



Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



TUNAS PANCASILA

➤ 2021



Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

TUNAS PANCASILA



Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

TUNAS PANCASILA

Pengarah:

**Direktur Sekolah Dasar
Sri Wahyuningsih**

Penyusun:

1. Anton Leonard SP
2. Deni Gunawan
3. Edi Rahmat Widodo
4. Esti Purnawinarni

Penulis:

Daniel Zuchron





Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud





Kata Sambutan

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Rahayu,
Salam kebajikan bagi kita semua,*

Saudara-saudari sebangsa dan setanah air Pancasila merupakan perjanjian luhur para pendiri bangsa Indonesia. Dia menjadi bagian yang tidak terpisah dengan kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimana nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila Pancasila dapat kita jumpai dalam segenap kehidupan bangsa Indonesia. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa "Pancasila tak kurang dan tak lebih menunjukkan sifat keluhuran serta kehalusan budi bangsa kita, menggambarkan dengan singkat, namun jelas, apa yang hidup di dalam jiwa bangsa kita. Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa: bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar peri kemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan ciptaan Tuhan".

Bagaimana menjaga dan menanamkan terus-menerus nilai-nilai Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisah dari dunia pendidikan di Indonesia. Anak-anak kita harus menemukan Pancasila sebagai ajaran yang hidup dalam lingkungan pendidikan mereka. Bahwa Pancasila adalah kebaikan yang terasa yang tidak hanya menjadi hafalan semata, namun tertanam kuat dalam jiwa dan sanubari mereka. Sehingga mereka akan menjadi jiwa yang kuat dalam menempuh jaman yang mungkin kita tidak akan menjumpainya sekarang. Hal inilah yang menjadi misi utama dunia pendidikan kita, mempersiapkan manusia Indonesia yang seutuhnya.

Bagaimana Pancasila menjadi pedoman untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang seutuhnya tercermin dalam Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Meskipun disadari menanamkan pengertian atas Pelajar Pancasila bukanlah tugas yang mudah, namun saya yakin dunia pendidikan kita sedang menuju ke sana.

Melalui Buku Tunas Pancasila yang diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Dasar dapat menjadi salah satu ikhtiar untuk menanamkan pengertian-pengertian yang terkait Pancasila. Tunas Pancasila sebagai predikat yang disematkan kepada anak-anak sekolah dasar merupakan terobosan Kemendikbud Ristek untuk menyemai nilai-nilai Pancasila sejak dini. Sehingga pada jenjang pendidikan berikutnya Pancasila akan bersemayam dalam sanubari anak-anak kita sebagai kebaikan yang hidup terus menerus dan melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa Indonesia. Terima kasih.

*Wassalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Santi Santi Santi Om, Namó Buddhaya, Rahayu,
Salam Kebajikan.*

Jakarta, 17 Agustus 2021

Nadiem Anwar Makarim

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia



Kata Pengantar

Jumeri, S.TP., M. Si.

Salah satu tujuan berdirinya negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dapat kita periksa kembali dalam Pembukaan UUD 1945, "... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Kemendikbud Ristek memiliki misi mulia untuk melaksanakan salah satu mandat pemerintahan yang mendasar tersebut yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Segegap upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut bersandar kepada dasar negara dan falsafah bangsa yakni Pancasila. Pancasila sebagai bintang penuntun (*leitstar*) yang memandu bangsa Indonesia mencapai tujuan hakikat kemerdekaannya memiliki sila-sila yang sederhana, tetapi luas dan dalam maknanya. Hal ini disadari oleh Kemendikbud Ristek sebagai misi sepanjang hayat negara ini untuk menggali, memahami, dan menyemai Pancasila dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Direktorat Sekolah Dasar sebagai bagian dari Kemendikbud Ristek berkeinginan untuk menanamkan pengertian Pancasila dan mengupayakannya menjadi karakter yang tercermin dalam Profil Pelajar Pancasila. Pendidikan sekolah dasar yang memiliki karakter yang khusus, tetapi fundamental sejak dini menjadi tantangan yang luar biasa agar Pancasila dapat dijadikan pegangan warga sekolah dasar. Hal inilah yang menjadi latar belakang anak didik sekolah dasar pada hakikatnya adalah tunas-tunas Pancasila. Sehingga diperlukan sebuah buku yang komprehensif dan menginspirasi warga sekolah untuk memahami Tunas Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan sekolah dasar.

Jakarta, 4 Agustus 2021

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



DAFTAR ISI

01	Pendahuluan	1
02	Menggali Pancasila	7
	a. Kelahiran Pancasila	9
	b. Hakikat Pancasila	15
	c. Pancasila Keniscayaan Indonesia	27
03	Memahami makna Pancasila	29
	a. Logika Pancasila	31
	b. Wujud Pancasila	37
	c. Pohon Karakter Pancasila	41
04	Menyemai nilai-nilai Pancasila	47
	a. Manifestasi Sila Pancasila	49
	b. Profil Pelajar Pancasila	65
	c. Tunas Pancasila	69
05	Penutup	75





Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

01

PENDAHULUAN

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 disebutkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinnekaan global. Visi tersebut menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.

Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia.

Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi dan misi Presiden tersebut.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya,



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Direktorat Sekolah Dasar yang mengemban amanat untuk memajukan pendidikan dasar di Indonesia memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk berperan dalam menyiapkan generasi pelajar tingkat dasar yang mengerti dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Kerangka ideal Pelajar Pancasila perlu dibangun fondasi yang kukuh dalam jiwa anak sekolah dasar. Keberhasilan penanaman nilai-nilai Pancasila akan berguna dan berlanjut pematangannya pada tingkat pendidikan berikutnya bahkan sepanjang hayatnya.

Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila di Sekolah Dasar merupakan penyiapan tunas-tunas Pancasila.

Sebagaimana diketahui, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan filsafat bangsa yang tercermin dalam sila-sila yang dikandungnya. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi jiwa dan menjiwai seluruh kehidupan kenegaraan dan kebangsaan bagi manusia yang menghuni tanah air Indonesia. Hal ini secara formal tertuang dalam perjalanan berdirinya Indonesia. Para pendiri bangsa telah melakukan kesepakatan agung dengan meletakkan Pancasila sebagai titik temu segenap kepentingan bangsa yang terasa hingga sekarang. Menjaga dan melanjutkan kesepakatan agung tersebut adalah konsekuensi logis bagi manusia Indonesia, khususnya Pelajar Pancasila.

Pancasila lahir dari penggalian khazanah kehidupan bangsa yang mendiami wilayah Nusantara. Dia merupakan produk otentik dari denyut kehidupan para pendiri bangsa yang mencita-citakan tegaknya negara dan bangsa. Perenungan mereka atas Pancasila bukanlah perenungan sesaat, tetapi hasil perenungan yang mendalam. Bagaimana menjaga berbagai keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan menjadikan negara sebagai wadah, dan bangsa sebagai jiwanya. Dia lahir dari dalam sanubari bangsa, dan dimatangkan dalam alam pergolakan perjuangan bangsa melawan penjajahan dan kehendak kuat menjadi dirinya sendiri tanpa campur tangan kekuatan asing. Sesuatu yang muncul kuat dari dalam dirinya mampu menerobos segala hambatan, dan dia tumbuh kokoh dalam kondisi apa pun.

Watak filosofis Pancasila yang tercermin dalam nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan/kebijaksanaan, dan keadilan merupakan kata-kata yang bernilai luhur. Keseluruhannya merupakan puncak-puncak peradaban yang selama ini dicari oleh para bijak bestari di dalam sanubari yang paling halus dalam jiwa manusia. Nilai yang dikandung dalam Pancasila merupakan nilai yang universal, dan karena itu bersifat fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan ini pada akhirnya akan membimbing pada kebaikan. Sesuatu yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan akan lenyap dan kebaikanlah yang akan bertahan. Oleh karena itu, warisan Pancasila merupakan penemuan otentik hasil dari pemecahan problematika kompleks dan paling musykil pada saat itu. Tugas dari generasi berikutnya telah dimudahkan jalannya, tinggal menyesuaikan dengan konteks perkembangan jaman selanjutnya.

Siklus kehidupan manusia yang bertahan dengan nilai-nilai yang digali dari pengalaman dan penjiwaan akan menyesuaikan dengan lingkungan dan ruang hidupnya. Nilai sesuatu ditentukan oleh sejauh mana dia memberikan manfaat kepada dirinya dan lingkungannya. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bagaimana Pancasila dapat disesuaikan dengan jiwa manusia Indonesia pada ruang dan waktu yang berbeda. Pedoman normatif dan pengetahuan sejarah yang bersumber dari Pancasila perlu dikenalkan dan dirasakan oleh segenap generasi penerus bangsa. Dunia pendidikan memiliki mandat dan tanggung jawab

yang vital dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila tetap lestari.



“Ibarat benih tumbuhan yang ditanam dalam tanah, dia akan berusaha menjadi tunas yang muncul ke permukaan tanah dan berjuang untuk mengatasi berbagai hama serta gangguan yang menjadikannya pohon yang berbuah dan memberi manfaat bagi sekitarnya. Pendidikan dasar adalah momentum menyemai benih Pancasila dan mempersiapkan tunas-tunas Pancasila baru muncul ke permukaan”.

Setiap peserta didik dalam pendidikan dasar merupakan benih yang diperlakukan sama dan dirawat sesuai dengan tumbuh kembangnya manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak. Oleh karena itu, peserta didik yang memiliki fitrah kemanusiaan, pada dasarnya memiliki segenap potensi Pancasila. Sebab Pancasila itu pun sesuai dengan nilai-nilai fitrah kemanusiaan. Lingkungan pendidikan yang menjadi ruang hidup nilai Pancasila merupakan laboratorium tumbuh kembangnya nilai Pancasila. Tunas-tunas Pancasila inilah yang tampak dalam permukaan, memiliki potensi yang sama dan setara menjadi manusia Indonesia sesungguhnya. Berbeda dengan dunia tumbuhan yang sangat sederhana, maka dunia manusia memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sesuai derajatnya sebagai makhluk yang paling sempurna.

Menyemai sesuatu yang sesuai dengan fitrah bergantung juga pada lingkungan yang menjadi ruang hidupnya. Lingkungan yang memberikan ruang hidup yang baik akan menumbuh



kembangkan semaian yang baik pula. Ekse pendidikan yang tercermin dari munculnya perilaku intoleransi, kekerasan seksual, dan perundangan (*bullying*) di sekolah memerlukan pendekatan yang cocok untuk diatasi dengan memperkuat nilai fitrah kemanusiaan. Sehingga menanamkan nilai Pancasila yang sesuai dengan watak pendidikan dasar menjadi tantangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Tunas yang muda lebih mudah untuk diarahkan dan dibentuk ketimbang mereka yang sudah dewasa, sudah mengeras, dan sulit untuk diluruskan serta diarahkan.

Bagaimana dunia pendidikan dasar mampu menyemai tunas-tunas Pancasila merupakan hakikat pendidikan di Indonesia yang akan mempersiapkan karakter dan watak anak didik menjadi pribadi yang mumpuni pada masa depan. Merekalah yang akan melanjutkan siklus kehidupan, gerak tiada henti, dan menghadapi tantangan yang berbeda dengan masa pendiri bangsa serta kita sekarang ini. Pedoman utamanya kembali kepada nilai-nilai filosofis yang bertahan abadi sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas, makhluk sosial, dan makhluk spiritual.

Gerakan Tunas Pancasila yang dipelopori oleh Direktorat Sekolah Dasar meletakkan pendidikan sebagai bagian dari manifestasi kebaikan kehidupan. Nilai dan jiwa Pancasila yang lestari dalam alam kehidupan Indonesia bergantung sepenuhnya atas dedikasi dan loyalitas warga sekolah menyemai benih agar tumbuh subur tunas-tunas Pancasila. Melalui buku ini, Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud berusaha menampilkan Pancasila yang mudah dan komprehensif untuk membantu pembaca dewasa secara langsung memahami isinya, menerapkan tuntunannya dan merefleksikan hasilnya dalam kehidupan keseharian yang konkret khususnya dalam lingkup Sekolah Dasar. Dan secara tidak langsung mampu disampaikan kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan yang berlangsung di sekolah dasar.

Buku Tunas Pancasila ini disajikan dalam lima bagian

mengikuti alur pikir deduktif. Mengenal realitasnya, memahami maknanya, mengenal kata-katanya, dan mengikuti pedoman teknisnya. Bagian pendahuluan memuat latar belakang Kemendikbud menerbitkan buku Tunas Pancasila sebagai pemegang mandat kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional. Konteks dan tujuan mengapa perlu dibuat buku ini diperlukan untuk mempersiapkan pembaca masuk lebih dalam ke bagian selanjutnya.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

Pada bagian kedua, tentang menggali Pancasila, ingin mengajak pembaca untuk memahami kehadiran Pancasila. Apakah kehadirannya merupakan sesuatu yang konkret atukah ilusi? Dia merupakan sesuatu yang penting sehingga diperlukan untuk mengenalnya lebih dalam. Pada tingkat tertentu bagian ini ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai sesuatu yang riil bukan sekadar manipulasi pikiran.

Bagian ketiga buku ini membahas tentang memahami makna Pancasila diasumsikan setelah bagian sebelumnya dipahami sehingga layak untuk dibicarakan. Keterampilan untuk menguraikan isi dan makna Pancasila terkait erat dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berpikir. Dan bagian ini ingin mengajak pembaca lebih jauh mengenali berbagai alat dan perangkat yang diperlukan untuk menguraikan dan menjelaskan Pancasila. Sehingga kreativitas untuk memahami alur pikir, metode, dan internalisasi Pancasila memiliki landasan berpikir yang kuat.

Setelah menyelesaikan bagian kedua dan ketiga maka pada bagian keempat yang mengurai tentang menyemai nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk menindaklanjuti dalam berbagai terapan dan aplikasi yang mengantarkan pemahaman bahwa profil pelajar Pancasila itu sangat mungkin untuk diwujudkan. Sehingga Pancasila dan isinya tidak menjadi sesuatu yang abstrak, tetapi sangat konkret dan mudah untuk dijalankan khususnya di sekolah dasar. Bagian terakhir sebagai penutup ditujukan untuk memberikan beberapa kesimpulan dan penajaman dalam bentuk fokus-fokus tertentu yang terkait dengan tujuan buku ini.





Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

02

MENGGALI PANCASILA

Bagian ini menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai hasil penggalian dari dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia. Pilihan kata “menggali” merujuk pada Soekarno atau Bung Karno sebagai salah satu penggali Pancasila. Untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, maka diperlukan penggalian hingga diperoleh emas permata. Ilustrasi fisik seperti ini merupakan tamsil perumpamaan untuk memudahkan pemahaman. Seringkali kita melupakan fakta bahwa selain hal-hal yang bersifat fisik materi ada juga yang bersifat nonfisik immateri. Ada yang bersifat lahir dan ada yang bersifat batin. Pancasila berada pada dimensi nonfisik immateri sama kedudukannya seperti halnya penyebutan terhadap kebaikan, keindahan, pendidikan, dan lain-lain.

Lazim, dalam pemikiran kita, dikenal alam material, alam intelektual, dan alam spiritual. Pembagian ini dilakukan selaras dengan kodrat manusia yang mampu menangkap dimensi-dimensi tersebut. Dalam dunia pendidikan, hal tersebut

harus terus menerus diupayakan agar anak didik dapat mengenali pembagian tersebut. Mulai dari yang paling mudah melalui pengenalan alam material dengan segenap panca indera yang dimiliki manusia. Kemudian masuk ke dalam alam intelektual yang bersifat penalaran pikiran abstrak, hingga masuk ke dalam alam spiritual batin yang bersifat penjiwaan menuju jati diri yang sesungguhnya dari anak didik.

Penggalian atas Pancasila pun tidak lepas dari tahapan-tahapan yang demikian tersebut. Bagaimana hamparan Nusantara yang memberikan pengaruh atas kehidupan manusia di atasnya menjadi pandangan dan pengalaman yang disaksikan, dirasakan, dan dijalani begitu saja. Perenungan demi perenungan yang dilakukan atas kejadian demi kejadian tersebut merupakan proses penggalian intelektual untuk menemukan fenomena apa yang dapat mengikatnya ke dalam sebuah konsep. Semangat intelektual yang kuat tidak mungkin berhasil tanpa

diiringi penjiwaan batiniah yang berujung pada rasa penghayatan atas kedalaman perenungan. Ada energi batin yang luar biasa membara yang memberikan spirit untuk menyampaikan hasil perenungan tersebut menjadi bernyawa. Sehingga Pancasila, menjadi seperti adanya sekarang, tidak lepas dari denyut kehidupan para pendiri bangsa. Dia digali dan dikumpulkan dan diseleksi dari nilai-nilai hidup yang berserakan bangsa Indonesia menjadi bentuk utuh dan filosofis (Hernandi Affandi, 2020: 40).

Mungkin saja Pancasila yang kita kenal sekarang dapat ditemui dalam bentuk aksara yang dapat dilihat entah di buku, dinding, spanduk, dan lain sebagainya. Hal tersebut diiringi dengan

pemahaman kita atas makna dan arti sila-sila Pancasila yang masuk dalam penalaran kita. Pancasila menjadi tampak masuk akal dalam pengertian, dan pikiran kita bisa menerimanya. Namun, apakah dia mampu memberikan semangat yang terasa membangkitkan jiwa nasionalisme kita atau terwujud dalam perilaku tindakan kita? Hal ini merupakan proses tiada henti dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dunia pendidikan sangat erat dan melekat atas proses penggalian terus menerus mengenali potensi masing-masing anak didik. Oleh karena itu, Pancasila yang digali dari bumi Indonesia atau realitas keindonesiaan tidak lepas dari upaya kreatif para pendiri bangsa memaknai dirinya sebagai bangsa Indonesia.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



A

Kelahiran Pancasila

Pancasila hadir melalui proses historis yang mengiringi kelahiran Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia melalui para tokoh pendiri bangsa meletakkan Pancasila sebagai simpul kesepakatan yang fundamental. Berbagai pikiran yang mengemuka pada saat itu merujuk kepada pentingnya dasar sebuah negara yang diimajinasikan bersama.

Kesadaran untuk mendirikan sebuah negara berdaulat tidak berangkat dari mimpi di siang bolong. Dia merupakan tumpukan memori yang diinisiasi atas kenyataan sejarah pergulatan bangsa. Sebuah bangsa yang mendiami deretan kepulauan yang membentuk lanskap geografis yang khas. Kawasan unik dan eksotik yang hanya satu-satunya ada di muka bumi, diapit oleh dua benua dan dua samudera. Kawasan inilah yang memicu dan memancing peristiwa besar penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa untuk mencari pusat rempah-rempah dunia di dunia timur Nusantara.

Berangkat dari memori kerajaan besar samudera Sriwijaya dan Majapahit serta berbagai kerajaan-kerajaan berdaulat, yang silih berganti di kota-kota kepulauan Nusantara, bangsa Indonesia menetapkan kedaulatannya sendiri. Dari Aceh hingga Papua, dari Sangihe hingga Rote tidak berhenti denyut nadi kehidupan bangsa yang telah

mengerti arti berdaulat atas dirinya. Kehidupan ini tercermin dari relasi politik, ekonomi, hukum, bahasa, dan sosial yang saling terhubung di antara mereka. Hal ini akan terbukti dan secara efektif digunakan untuk mendirikan Indonesia kemudian.

Kebutuhan untuk mendirikan suatu negara merupakan bawaan jiwa bangsa Indonesia yang mendambakan kemerdekaan abadi. Hingga tiba masanya perubahan besar geopolitik dunia dipengaruhi oleh dua perang dunia yang semakin mendekatkan pintu kemerdekaan Indonesia. Kematangan dan kedewasaan bangsa ini tercermin dari saling bahu-membahunya para pendiri bangsa menyiapkan Indonesia yang merdeka. Khususnya pada saat perumusan dasar yang diperlukan untuk mendirikan suatu negara.

Rekaman sejarah pendirian negara dalam forum-forum persiapan mendirikan negara Indonesia menunjukkan relasi yang erat antar pendiri bangsa. Secara formal perumusan tersebut diwadahi dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) hingga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Bukan kebetulan, jika peristiwa tersebut terjadi pada saat perubahan geopolitik besar dunia menjelang berakhirnya PD II tahun 1945. Hal ini hanya menunjukkan kejelian dan kecerdasan memanfaatkan momentum yang ada



agar mimpi memiliki negara yang berdaulat segera terwujud. Tidak mungkin momentum tersebut jatuh dari langit begitu saja, kecuali dari usaha dan ikhtiar tiada henti dari perjuangan kemerdekaan jauh-jauh hari.

Kelahiran merupakan salah satu bagian dari siklus kehidupan. Kelahiran menandai fase perubahan dari sesuatu yang potensial menjadi aktual manifes. Begitu pula dengan Pancasila yang lahir melalui rahim ibu pertiwi. Yudi Latif memberikan penjelasan perumpamaan kelahiran Pancasila melalui fase pembuahan, fase perumusan, dan fase pengesahan (Yudi Latif, 2015).

Melalui fase pembuahan, Pancasila digambarkan sebagai gagasan yang dimulai dari kesadaran sejarah yang muncul sejak Indonesia belum merdeka. Pancasila bukan lahir tiba-tiba begitu saja, tetapi erat kaitannya dengan perjuangan jauh sebelumnya atas cita-cita menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Batas kesejarahan pada fase ini dapat dirujuk kepada memori yang dekat ataupun yang jauh. Memori yang jauh dapat dihubungkan seperti halnya leluhur kita yang selalu berdoa agar anak keturunannya kemudian menjadi manusia yang berguna. Sementara memori yang dekat terkait dengan patok-patok sejarah berdasarkan catatan dan dokumen sejarah yang otentik.

Sejarah Pancasila yang tercatat, meminjam Yudi Latif, merujuk sejak 1924 tatkala Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda merumuskan konsepsi bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada empat prinsip: persatuan Nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Tan Malaka menuliskan manifestonya melalui buku *Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia) pada tahun yang sama. Tjokroaminoto juga mulai mengungkapkan gagasan sintesis Islam, sosialisme dan demokrasi. Hingga kemunculan "Sumpah Pemuda" pada tanggal 28 Oktober 1928 yang monumental (Yudi Latif, 2015: 5-8). Pada tahun yang berdekatan 1926 Soekarno menulis tentang "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" yang mengupas tentang tiga sintesis gagasan besar menuju persatuan Indonesia. Disusul di media yang sama *Suluh Indonesia Muda* tahun 1928 Soekarno juga menulis tentang "Indonesianisme dan Pan-Asiatisme" yang mengungkap tentang pergolakan bangsa Asia atas penjajahan (Iman

Toto K. Rahardjo & Suko Sudarso, 2006). Imajinasi tentang kemerdekaan begitu bergelora pada masa-masa permulaan abad 19 dalam suasana penjajahan Belanda di kalangan pemikir bangsa. Perasaan untuk merdeka dari penjajahan menuntut mereka memberikan visi tentang bagaimana seharusnya menjadi negara yang merdeka.

Ketika Belanda dikalahkan Jepang, bangsa Indonesia hanya menyaksikan pergantian majikan. Karena tuntutan untuk mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia, Jepang menebar propaganda yang mempesona dengan menyebut dirinya sebagai saudara tua hingga janji untuk memberikan kemerdekaan. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa keberadaan negara sebagai entitas yang berdaulat untuk mengatur dirinya sendiri merupakan kondisi umum. Bangsa tidak akan bersatu tanpa adanya negara, negara tidak akan kuat tanpa persatuan dan solidaritas bangsa. Fase ini masuk pada perumusan negara yang di dalamnya berdasarkan Pancasila.

Dasar negara merupakan ketentuan fundamental yang di atasnya segala perbedaan disatukan dan dikembalikan. Syarat-syarat mendirikan sebuah negara memerlukan kesepakatan bersama. Tanpa kesepakatan tersebut telah terbayang bagaimana ringkihnya mendirikan suatu negara yang akan menyatukan segenap elemen yang berbeda-beda. Hal inilah yang dibahas dalam sidang-sidang BPUPK. BPUPK didirikan pada 29 April 1945 atas janji Jepang bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan dan beranggotakan 69 orang yang dipimpin oleh Radjiman Wediodiningrat (Yudi Latif, 2015: 9). Persidangan BPUPK dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan tahap kedua tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945 ("Lahirnya Pancasila", 1947). Secara formal, bangsa Indonesia telah menunjukkan kemampuan untuk menentukan nasib sendiri melalui rembukan nasional melalui BPUPK. Dan deklarasi penentuan nasib sendiri itu diwujudkan melalui Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 atas kejeniusan dan kecerdasan para pendiri negara melihat perkembangan yang terjadi saat itu.



Ketika BPUPK bersidang, sudah muncul berbagai usulan atas dasar apa negara Indonesia berdiri. Meskipun istilah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi sebelumnya telah dipaparkan oleh segenap peserta sidang tentang pandangannya atas dasar negara. Yudi Latif menilai aneka ragam pandangan yang diajukan dalam persidangan tersebut masih bersifat serabutan, meskipun secara prinsip telah tertanam kesepahaman atas ragam pandangan tersebut yang mengacu pada pentingnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi permusyawaratan, dan pentingnya nilai keadilan/ kesejahteraan sosial (2015: 10-11).

Fokus utama yang dibahas sesuai dengan arahan ketua sidang Radjiman Wediodiningrat, "apa dasar negara ini?"

Istilah Pancasila baru terungkap ketika Soekarno menyampaikan pidato tanpa teksnya tentang dasar negara tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menilai apa yang telah disampaikan anggota BPUPK sebelumnya belum menjawab secara tegas pertanyaan tentang dasar negara. Mohammad Hatta menuturkan bahwa ketika,

"... Ketua Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia membuka sidang panitia itu dengan mengemukakan pertanyaan kepada rapat; "Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya? Kebanyakan anggota tidak mau menjawab pertanyaan itu karena takut pertanyaan itu akan menimbulkan persoalan filosofi yang akan berpanjang-panjang. Mereka langsung membicarakan soal Undang-Undang Dasar. Salah seorang dari pada anggota Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia itu, yang menjawab pertanyaan itu ialah Bung Karno, yang mengucapkan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang berjudul Pancasila, lima sila, yang lamanya kira-kira satu jam.." (Mohammad Hatta dkk, 1984: 101).



Bagian pidato Soekarno yang menjawab pertanyaan Ketua sidang BPUPK saat itu yakni:

“... Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “Philosofische grondslag” dari pada Indonesia merdeka. Filosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi...” (“Lahirnya Pancasila”, 1947: 1-2).

Setelah Soekarno menguraikan tentang *Philosophische Grondslag* dalam bentuk Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/Perikemanusiaan, Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan, maka dia menyebutkan penamaannya dengan Panca Sila. Katanya,

“... Saudara-saudara ‘Dasar-dasar Negara’ telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indera. Apa lagi yang lima bilangannya?”

(Seorang yang hadir: Pendawa lima).

Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip; kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi...” (“Lahirnya Pancasila”, 1947: 35).

Setelah sidang 1 Juni 1945 tersebut kemudian dibentuklah Panitia Kecil guna menindaklanjuti hasil persidangan BPUPK. Menurut Yudi Latif, Panitia Kecil yang dimaksud sebagai keputusan Sidang BPUPK berbeda dengan Panitia Kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan yang akan melahirkan Piagam Jakarta. Meskipun tetap ketua panitia kecil tersebut dipimpin oleh Soekarno. Panitia kecil yang dinamakan dengan Panitia Sembilan bertugas untuk menyusun rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya termuat dasar negara (Yudi Latif, 2015: 21-23). Hasilnya adalah perbaikan sila-sila yang ada dalam pidato Pancasila 1 Juni 1945 menjadi Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Mohammad Hatta memberikan penuturan lebih lanjut atas peristiwa Piagam Jakarta tersebut. Menurutnya,

“... Sesudah itu sidang mengangkat suatu Panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang diucapkan Bung Karno itu. Di antara Panitia kecil itu dipilih lagi sembilan orang yang akan melaksanakan tugas itu, yaitu: Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, Wahid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin.

... Pada tanggal 22 Juni 1945 pembaruan rumusan



Sumber Foto: google.com

Panitia 9 itu diserahkan kepada Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia dan diberi nama "Piagam Jakarta". Kemudian seluruh Piagam Jakarta itu dijadikan "Pembukaan" Undang-Undang Dasar 1945, sehingga "Pancasila dan Undang-Undang Dasar" menjadi "Dokumen Negara Pokok"... " (Mohammad Hatta dkk, 1984: 101-102).

Akhirnya kesepakatan para pendiri bangsa mendasarkan kepada persetujuan atas Pancasila yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945, disempurnakan melalui Panitia Sembilan yang mencetuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 ditetapkan sehari setelahnya pada

Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai fase pengesahan seperti Pancasila yang kita kenal sekarang. Pancasila dengan sila-sila: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perjalanan historis Pancasila bagi bangsa Indonesia melalui fase-fase alamiah merupakan sesuatu yang lazim dalam dunia pendidikan. Pendidikan sebagai proses menuntun perkembangan manusia menuju kesempurnaan memiliki relasi yang dekat dengan Pancasila. Kita bisa saksikan tumbuh tenggelamnya sebuah peradaban dan gagasan sejak manusia menghuni muka bumi. Sehingga bagaimana Pancasila bisa abadi dan bertahan di bumi Indonesia relevan dalam dunia pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-anak hingga orang tua. Inilah tantangan dunia pendidikan di Indonesia untuk memahami bagaimana Pancasila tumbuh dan berkembang dalam segenap sanubari anak bangsa sepanjang hayat.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



B Hakikat Pancasila

Sesuatu yang tidak memiliki kesamaan akan sulit untuk dipadankan. Realitas bangsa Indonesia yang plural dan majemuk membutuhkan pengikat yang mempersatukan perbedaan. Pancasila menjadi simpul yang mempersatukan keragaman gagasan dan kehendak bangsa Indonesia. Hakikatnya Pancasila itu adalah bangsa Indonesia itu sendiri.

Indonesia yang kita kenal hari ini sebagai sebuah bangsa dan negara merupakan suatu entitas yang tidak tunggal, atau dengan kata lain ia adalah entitas yang kompleks. Sehingga kemunculan Indonesia sebagai sebuah bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia, tidak dapat kita pandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Keberhasilan memunculkan "diri" itu tidak lepas dari proses yang panjang, berliku, dan harus melewati jalan terjal berbahaya. Jauh sebelum para pendiri bangsa (*founding fathers*) kita menegaskan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara, dia merupakan sebuah entitas dengan berbagai macam karakteristik yang satu sama lain berbeda. Di mana dahulu orang mengenalnya sebagai Nusantara dan kemudian Hindia-Belanda.

Pada mulanya bermacam-macam suku bangsa mendiami kawasan Asia Tenggara, dalam lingkungan ribuan pulau, besar, dan kecil. Hubungan antar pulau tidak selalu mudah. Hal itu menyebabkan sebagian dari pulau-pulau tersebut terisolasi satu dengan yang lain. Kenyataan tersebut kemudian meniscayakan tumbuhnya sikap primordial dan kesukuan yang sempit. Tidak hanya itu, bahkan kebudayaan dan kebahasaan mereka pun terpisah-pisah. Termasuk dalam konteks pulau-pulau yang besar sekali pun, pola kesukuan dan kebudayaan yang berbeda-beda memunculkan karakteristik yang khas masing-masing menurut lingkungannya. Hal itu tidak lepas dari situasi geografis dan topografis yang menyebabkan terbentuknya wilayah-wilayah yang tidak terikat satu dengan yang lain.

Fakta bahwa sesungguhnya Indonesia tidaklah tunggal harus diterima dan diyakini secara sungguh-sungguh agar kita mampu melihat Indonesia secara keseluruhan dengan lebih arif. Sebelum kita mengenal Indonesia modern hari ini, jauh sebelumnya telah eksis berbagai entitas kebudayaan, kesukuan, agama, dan bangsa yang mendiami pulau-pulau di Nusantara. Masing-masing dari mereka memiliki sistem kebudayaan, pemerintahan, dan sosialnya sendiri-sendiri. Mereka hidup secara terpisah berdasarkan identitas mereka masing-masing. Mereka semua, di kemudian hari,



kita sebut sebagai subkultur dari sebuah bangsa bernama Indonesia.

Fakta tentang keragaman budaya tersebut sesungguhnya, setidaknya-tidaknya menurut Nurcholish Madjid atau Cak Nur, memperlihatkan dua sisi yang bertolak belakang. *Pertama*, keragaman budaya tersebut bisa menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan sebuah kebudayaan yang tangguh melalui silang kebudayaan. Masing-masing dari entitas kebudayaan itu saling mengenal, mengisi, dan menguatkan satu sama lain yang kemudian membentuk satu kebudayaan nasional yang menjadi identitas keindonesiaannya. Karena itu, dalam konteks ini, menemukan identitas kebudayaan Indonesia dalam suatu masyarakat yang beragam menjadi keniscayaan untuk memunculkan jati diri sebagai sebuah bangsa baru bernama "Indonesia" (Nurcholish Madjid, 2004: 8-9).

Kedua, keragaman budaya tersebut juga bisa menjadi kerawanan tersendiri bagi penyatuan antar suku dan pulau yang ada. Sebagaimana telah dijelaskan, kondisi topografis dan geografis Indonesia telah mendorong munculnya perbedaan dan sifat khas dari masing-masing suku dan wilayah. Kondisi seperti ini tentu memiliki kerentanan yang cukup tinggi bagi persatuan entitas-entitas Indonesia yang berbeda itu. Maka tak heran bila Asia Tenggara dalam hal ini termasuk Indonesia sangat rentan terhadap pendudukan atau penjajahan yang datang dari luar.

Dalam sejarahnya, menurut Cak Nur, upaya untuk menguatkan ikatan beberapa entitas kebudayaan dan pulau melalui penyatuan dengan kekuatan politik pernah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Misalnya, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Aceh. Dalam beberapa dekade, upaya kerajaan-kerajaan itu memang berhasil. Namun, dalam beberapa aspek penyatuan wilayah pada waktu itu tidak persis sama dengan wilayah Indonesia saat ini. Pada satu aspek, wilayah yang disatukan pada waktu itu memiliki ukuran lebih kecil dari wilayah Indonesia hari ini, karena tidak mencakup Sabang-Merauke. Sementara di sisi lain, penyatuan wilayah itu juga lebih luas dari wilayah Indonesia hari ini, karena mereka berhasil menaklukkan wilayah-wilayah luar di luar Sabang-Merauke seperti wilayah Kalimantan Utara,

Mindanao, Madagaskar, dan sebagainya.

Fakta sejarah memang tidak selalu mengasyikkan dan menyenangkan semua pihak, tetapi hal itu perlu dibicarakan secara lebih jujur agar ke depan kita bisa mengisi hari-hari kemerdekaan dengan lebih arif dan bertanggung jawab. Adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah jika Nusantara adalah sebuah wilayah yang diapit oleh dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudera, Hindia dan Pasifik. Kondisi ini tentu sangat subur bagi tumbuhnya penetrasi kebudayaan dan agama dari luar Nusantara. Menurut Ahmad Syafii Maarif, karena kondisi geopolitiknya yang strategis dan kondisi alamnya yang kaya, Nusantara telah menjadi incaran bangsa-bangsa lain sejak permulaan abad Masehi untuk segala macam kepentingan, agama, ekonomi-perdagangan, kultur, lalu akhirnya penjajahan (A. Syafii Maarif, 2015: 59).



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

Lebih jauh, Syafii Maarif menjelaskan bahwa di antara hal yang penting dan berpengaruh kuat selama berabad-abad adalah agama Hindu dan Buddha. Dua agama ini, dalam sejarahnya di Nusantara, pernah saling berebut pengaruh sampai ke tingkat peperangan, seperti Majapahit yang Hindu mengalahkan Sriwijaya yang Buddha di kisaran abad ke-14. Setelah itu, Islam masuk sebagai agama dan kekuatan baru. Meski demikian, gerak laju Islam masuk ke bumi Nusantara, sebelum bersentuhan dengan pendatang Eropa yang juga memasuki wilayah Nusantara, juga harus berurusan dengan dua agama tua tersebut (A. Syafii Maarif, 2015: 59).



Faktanya, Nusantara dahulu dihuni oleh berbagai entitas yang saling menguasai dan dikuasai. Masing-masing menguatkan eksistensi dirinya dengan menguatkan politik-kekuasaan dan juga pengaruhnya melalui kebudayaan dan agama. Meski demikian, berbagai macam entitas tersebut ternyata tidak satu, mereka memiliki sistem pemerintahan dan kebudayaannya sendiri yang berbeda satu sama lain. Mereka hidup terpisah berdasarkan identitas mereka masing-masing. Bahkan, sebagaimana telah disebut di atas, beberapa dari mereka mencoba saling menginvasi dan menguasai, menjajah dan terjajah. Sampai kemudian, sejarah mencoba mengatakan bahwa agenda persatuan Nusantara dimulai oleh Majapahit melalui Patih Gajah Mada dengan agenda penaklukan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara di bawah satu imperium bernama Majapahit.

Sampai di sini kita memahami bahwa sesungguhnya mendefinisikan Indonesia modern hari ini amatlah sulit dan perlu hati-hati. Sebab pendefinisian Indonesia dengan menghadirkan contoh partikular atau tunggal akan menafikan Indonesia secara universal. Dan itu akan berdampak pada pemahaman kita tentang bangsa Indonesia itu sendiri. Majapahit memang memprakarsai agenda

penyatuan wilayah Nusantara, tetapi menyebutnya sebagai cikal bakal utama dari berdirinya Indonesia rasanya kurang tepat, sebagaimana telah disebut pada penjelasan sebelumnya. Bagaimanapun, Majapahit bukanlah satu-satunya entitas imperium yang ada di Nusantara kala itu. Ia hanya satu dari sekian banyak imperium yang ada, hanya saja, kekuatan militer dan politik Majapahit yang kuat pada saat itu memungkinkan untuk mendominasi kekuatan-kekuatan imperium yang lebih kecil saat itu.

Fakta sejarah dan kerumitan itu sesungguhnya dipahami betul di kemudian hari oleh para pendiri bangsa kita. Bahwa untuk mendirikan sebuah bangsa yang satu, bangsa Indonesia, maka diperlukan perekat yang tidak tunggal dan partikular, tetapi perekat itu harus sifatnya lebih universal, di mana setiap entitas yang ada di dalamnya merasa perekat itu adalah dirinya. Dalam artian bahwa ketika saya adalah orang Jawa, misalnya, pada saat yang sama saya adalah orang Indonesia. Artinya saya juga adalah bagian dari orang Bali, orang Dayak, Batak, dan sebagainya.



Di sisi lain, kesadaran Nasional Indonesia baru muncul sekitar tahun 1920-an di kalangan pelajar Indonesia di negeri Belanda, meskipun nama Indonesia sendiri telah digunakan sejak tahun 1844 yang dipopulerkan oleh sarjana Jerman Adolf Bastian dari Universitas Berlin untuk menunjuk gugus kepulauan Melayu (A. Syafii Maarif, 2015:59). Sementara dalam konteks pribumi, Ki Hajar Dewantara disebut sebagai orang yang pertama-tama mempopulerkan nama Indonesia ketika ia dibuang ke Belanda pada tahun 1913. Hal itu dilakukannya dengan menerbitkan biro pers dengan nama *Indonesische Persbureau*.

Sementara itu, kesadaran Nasional para arif, pemikir, ulama, dan bijak bestari kala itu akhirnya berbuah puluhan tahun kemudian menjadi sebuah negara Indonesia, tepatnya 17 Agustus 1945. Kita yakin dengan pasti bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia telah eksis dan sejajar dengan negara lain di dunia pada 17 Agustus tahun tersebut. Namun, sebagai bangsa, kapankah Indonesia lahir? Di sinilah para ahli memiliki perbedaan pendapat. Namun, lepas dari itu semua, sesungguhnya gema persatuan sayup-sayup terdengar dengan berkumpulnya beberapa anak muda terdidik Indonesia dari berbagai daerah untuk mengkonsepsikan sebuah bangsa baru bernama Indonesia. Agenda itu kita kenal dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Setidak-tidaknya, gema persatuan berbagai entitas subkultur dan kebangsaan itu mulai digaungkan, dan istilah bangsa Indonesia baru dipopulerkan dalam satu wadah organisasi modern. Meskipun jauh sebelumnya telah banyak organisasi yang memiliki kesamaan pikiran untuk membentuk sebuah negara, tetapi pernyataan sikap sebagai sebuah bangsa baru dipertegas pada saat itu.

Isi Sumpah Pemuda tersebut sebagai berikut:

***Pertama,** Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.*

***Kedoea:** Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia*

***Ketiga:** Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.*

Dengan demikian, maka kita sesungguhnya sadar bahwa pencarian tentang hakikat sesuatu merupakan sesuatu yang bersifat bawaan manusia. Manusia selalu tertarik dengan hal-hal yang membangkitkan keingintahuan. Dengan kemampuan yang dimilikinya manusia mencari jawaban atas ketertarikannya terhadap sesuatu. Bisa saja hasilnya akan berbeda dan itu wajar adanya. Karena misteri tentang hakikat sesuatu itu sangatlah rumit, maka ragam pandang untuk ini menjadi pencarian abadi. Sehingga dalam sejarah pencarian ini memunculkan beragam orang bijak bestari yang memberikan jawabannya. Mereka kita kenal sebagai orang-orang utama dalam pentas sejarah seperti para nabi, begawan, pandita, filosof, sufi, cendekia dan lain sebagainya.





Plato melukiskan situasinya dengan alegori orang gua (*cavemen allegory*). Ketika ada orang yang mampu keluar dari gua kemudian mengabarkan kepada temannya yang tidak pernah keluar mereka tidak percaya atas apa yang telah disaksikan temannya itu. Perumpamaan lain sering dinisbatkan kepada tiga orang buta yang diminta menjelaskan tentang gajah. Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kakinya, ada yang memegang kupingnya, dan penjelasan tentang apa itu gajah bagi mereka sesuai dengan apa yang dirasakannya saat menyentuh masing-masing bagian gajah. Contoh lainnya seperti pertanyaan apa hakikatnya api? Akan berbeda jawabannya bagi orang yang hanya melihat sesuatu yang dinamakan api dari jarak jauh dengan orang yang dekat dengan api hingga terasa hembusan panasnya dan juga bagi orang yang melebur dengan api. Sampai ada ungkapan manusia adalah api itu sendiri yang dimaknai orang yang menyala-nyala semangatnya.

Simbol dan perumpamaan tentang hakikat sesuatu itu sangat nyata dan hidup dalam alam sekitar kita melalui ragam kata bijaksana, kata-kata mutiara, ragam petuah, peribahasa, adat tradisi, aksara, seni, dan lain-lainnya. Apalagi dalam alam Indonesia yang beragam etnis, bahasa, geografis, dan budaya sangat kaya dengan khazanah lokal yang mencerminkan keluhuran manusianya mendekati realitas yang hakiki. Dengan kata lain tingkat kedalaman realitas seseorang mempengaruhi temuan dan jawaban atas pencariannya terhadap sesuatu.

Mencari hakikat tentang sesuatu sepadan dengan

mencari jawaban apakah sesuatu itu. Dan hal ini tentu akan sangat beragam jawabannya. Pada tingkat lainnya, hakikat sesuatu juga terhubung dengan level kehadirannya bagi seseorang secara personal. Hakikat bagi dirinya akan memberikan efek dan dampak yang sangat mendalam serta menginspirasi dirinya untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks inilah pengetahuan tentang hakikat menjadi mudah dipahami dan dirasakan oleh seseorang. Semakin mendalam kontemplasi seseorang untuk mencari hakikat sesuatu, semakin berdampak kepada dirinya untuk melakukannya. Sehingga pemahaman dirinya tentang sesuatu dan keberadaannya yang berdampak pada dirinya merupakan sarana mencapai sesuatu yang hakiki. Hal ini menjelaskan tentang Pancasila yang terasa dekat bagi rakyat meskipun dia tidak mampu mengungkapkannya. Begitu juga halnya Pancasila dapat dijelaskan dalam bentuk buku pengetahuan yang berjilid-jilid. Dengan demikian, Pancasila tersebut sesungguhnya universal sifatnya, sehingga ia bisa terang dengan sendirinya di jiwa masyarakat Indonesia tanpa perlu menjelaskannya, meski di sisi lain Pancasila yang terang benderang itu bisa juga dijelaskan melalui tulisan dalam bentuk buku-buku pengetahuan.

Lantas apa hakikatnya Pancasila? Hal itu menjadi pencarian yang tiada henti bagi bangsa Indonesia. Ibarat mengupas bawang yang terdapat banyak lapisan kulit bawang, apa hakikatnya bawang? Untuk memudahkan pembahasan hakikat Pancasila maka kita akan mengupas lapisannya secara bertahap.



Dimensi Kesejarahan

Dari mana kita mengenal Pancasila? Tentu saja kita mengenalnya dari informasi, tepatnya informasi sejarah. Pancasila sebagai gagasan *genuine* atau asli khas Indonesia telah terbukti dari amatan sejarah. Berbagai dokumen, ulasan, dan buku-buku tentang Pancasila bertebaran di mana-mana. Secara substansi, sejarah bersandar kepada ragam fakta, dokumen, dan informasi yang menghindari sejarah tidak benar dan otentik.

Oleh karena itu, sikap jujur kita dalam membaca masa lampau terletak pada sikap kritis kita dalam memandang masa lampau tersebut, siapa pun yang menjadi aktor dalam sejarah tempo itu. Memang, pada akhirnya, sikap jujur itu tidak selalu berbuah manis, terkadang dari pembacaan jujur terhadap sejarah itu memunculkan panorama masa lalu yang benjol, datar, dan tidak utuh, tetapi hal itu harus kita katakan secara jujur sebagai bahan refleksi dan evaluasi kita dan generasi mendatang bagaimana sesungguhnya harus menjalankan dan mengisi kemerdekaan negara yang plural ini.

Memang pandangan yang sifatnya partikular dan partisan akan selalu terlihat elok dan manis, seolah-olah bahwa sejarah dan pelakunya tidak memiliki cacat sedikitpun. Hal ini tentu akan memberikan informasi yang terputus dan tidak tuntas pada generasi selanjutnya. Konsekuensinya, mereka akan kehilangan dimensi sejarah negara dan bangsanya, pada akhirnya mereka akan bingung mengelola negara dan bangsa dengan benar, tepat, dan bijak.

Meski pada akhirnya kita menyadari bahwa menghadirkan *puzzle* sejarah yang utuh dan

sempurna mustahil dihadirkan oleh penulisan sejarah mana pun sepanjang abad, pada semua unit peradaban. Namun, kita yakin bahwa sejarah yang ideal adalah sejarah yang ditulis dengan kejujuran penulisnya, sesuatu yang oleh Syafii Maarif secara pesimis disebut *nisbi* dan tidak mudah karena manusia sarat akan kepentingan. Meski begitu, yang selalu dituntut dari penulis sejarah adalah agar mereka tidak menulis sejarah tanpa menghadirkan fakta, betapa pun fakta itu akhirnya terasa pahit dan tidak menyenangkan bagi sebagian pihak. Oleh karena itu, penulisan sejarah, apalagi sejarah Pancasila, haruslah diiringi dengan integritas penulisnya. Tanpa itu, sejarah yang dihasilkan pasti mengandung cacat akademik.

Sebagai sebuah negara, usia Indonesia terhitung masih sangat muda jika dibandingkan dengan negara demokrasi lain seperti Amerika Serikat atau Prancis. Jika kita perhatikan, negara dan bangsa yang kita tempati dan sebut Indonesia ini tidak lain adalah wilayah yang dulunya juga dikuasai penjajah, dalam hal ini Belanda. Maka tidak heran, bila dalam teks proklamasi disebutkan bahwa *"pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya"*. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa para pendiri bangsa kita menyadari bahwa bangsa dan negara yang akan mereka lahirkan adalah sebuah bangsa dan negara dengan wilayah yang sama sebagaimana wilayah yang dikuasai penjajah. Mereka hanya perlu mengambil alih penguasaannya.

Meski demikian, kemerdekaan yang kita peroleh tersebut sesungguhnya bukanlah hadiah apalagi pemberian yang berasal dari belas kasih dan hati nurani penjajah. Namun, hal itu seluruhnya berasal atas berkat dan rahmat Allah serta kesadaran kolektif masyarakat bangsa kita untuk terbebas dari penjajahan dan hidup dalam bangsa yang baru dan satu dengan harkat dan martabat yang terhormat. Meski begitu, kita harus jujur terhadap sejarah, kita sangat sulit membayangkan Indonesia hari ini, baik sebagai sebuah negara atau bangsa, tanpa didahului oleh sistem penjajahan, khususnya Belanda di mana masa penguasaannya lebih panjang daripada penguasaan negara penjajah lainnya di Nusantara. Nah, bekas wilayah jajahan itulah yang hari ini menjadi Indonesia, sebagaimana telah disebut di atas.

Sementara itu, kesadaran kolektif atau kesadaran Nasional untuk membentuk sebuah bangsa yang satu dalam berbagai realitas keragaman budaya, agama, suku, dan sebagainya, baru timbul pada tahun 1920-an. Tahun-tahun tersebut disebut sebagai tahun dimulainya kesadaran kebangsaan dari anak-anak bangsa terdidik. Era itu kita kenal sebagai era Pergerakan Nasional. Era Pergerakan Nasional ini sendiri terasa agak paradoks. Timbulnya Pergerakan Nasional sesungguhnya merupakan akibat dari pendidikan Barat (Belanda) sendiri yang telah membuka cakrawala para pelajar dan penduduk Nusantara untuk melihat realitas bahwa penjajahan sesungguhnya bertentangan dengan prike-manusiaan dan prike-adilan. Oleh karena itu, meski mereka mendapatkan pendidikan modern dari penjajah, tetapi secara otentik kesadaran mereka, terhadap realitas yang timpang dan tidak adil akibat penjajahan, muncul dari dalam diri mereka sendiri.

Realitas sejarah inilah yang mesti kita pahami dan renungkan secara dalam, kenapa? Agar kohesi nasional kita terus menguat dan merekat di tengah-tengah kenyataan pluralisme agama dan subkultur negara dan bangsa kita yang beragam dan berbeda-beda. Dimensi sejarah seperti inilah yang perlu kita pahami untuk juga memahami Pancasila. Pancasila dihadirkan sebagai perekat atas fakta dan realitas demografi dan realitas sosio-historis kita yang tidak tunggal. Inilah dimensi sejarah Pancasila. Ia merupakan keniscayaan yang harus terus dipahami setidak-tidaknya sebagai sebuah "perumahan" yang nyaman untuk ditempati, tidak hanya bagi satu orang atau golongan, tetapi untuk semua orang dan golongan Indonesia.

Oleh karena itu, setiap negara pasti memiliki dasar negaranya. Dasar negara itu berfungsi sebagai pengikat dan perekat semua entitas yang hidup dalam sebuah bangsa. Hal itu menjadi sangat penting, lebih-lebih bagi sebuah bangsa yang di dalamnya sangat kaya akan perbedaan dan keragaman, seperti Indonesia. Maka Pancasila adalah kesimpulan dari semua fakta sosio-kultur dan sejarah yang memersamainya berdirinya bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian, pandangan atas sejarah menjadi sesuatu yang mendasar dalam eksistensi manusia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali melupakan



Sumber Foto: google.com

sejarah. Bahkan, dalam berbagai kitab suci juga tidak melepaskan diri dari informasi tentang sejarah. Oleh sebab itu, hakikat Pancasila sebagai hasil dari sejarah tidak dapat ditolak. Bahkan, Soekarno menyebut bahwa Pancasila tidak diciptakan, melainkan digali dari rahim bangsa Indonesia sendiri. Artinya, Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri, bukan sesuatu yang berasal dari luar kemudian "menjadi" Indonesia.

Dimensi Pemaknaan

Pada tingkat abstraksi berikutnya, Pancasila memiliki banyak makna. Mengasah intelektualitas pada dasarnya mengungkap berbagai makna atas segala fenomena. Kita dapat membaca segenap buku yang ditulis oleh segenap penulis tentang Pancasila. Dan akan ditemukan keragaman dan variasi pemaknaan atas Pancasila.

Dari dimensi ini sila-sila Pancasila mencerminkan makna yang sangat mendalam yang bersifat esensial. Kesederhanaan kalimat yang ada di dalamnya memudahkan untuk dihafalkan. Upaya pemaknaan ini berdampak pada seperangkat analisis ilmu pengetahuan tentang Pancasila. Dari sini kita bisa memahami ragam pemaknaan dari berbagai individu tentang Pancasila. Hernandi Affandi mengumpulkan penamaan Pancasila dalam berbagai predikatnya seperti: jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Republik Indonesia,



sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, falsafah hidup bangsa Indonesia (2020: 63).

Pantulan Pancasila memberikan inspirasi bagi para pendiri bangsa dan para pemikir cendekiawan untuk menangkap pesan dan gambaran yang dihasilkannya. Notonagoro menilai Pancasila yang lahir pada sidang BPUPK bukan saja konsepsi politik tetapi “buah hasil perenungan jiwa dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas yang tidak begitu saja dapat dicapai oleh saban orang” (Aning Floriberta, 2017: 16-17). Dalam kesaksiannya atas pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Dr. Radjiman Wediodiningrat menangkapnya sebagai pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar negara.

“Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh ‘Lahirnya Pancasila’ ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu Democratisch Beginsel, suatu Beginsel yang menjadi dasar negara kita, yang menjadi Rechtsideologie negara kita, suatu Beginsel yang telah meresap dan berurat akar dalam jiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada di bawah penilikan yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka, tak mungkin dikekang-kekang” (“Lahirnya Pancasila, 1947).

Soekarno sendiri, dalam mengungkapkan Pancasila, menyebut Pancasila merupakan gambaran hasil pemaknaan atas realitas bangsa yang tercermin dalam gagasannya bertahun-tahun.

“... Bahkan saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wata’ala, bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tetapi di bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. Timbullah Indonesia Merdeka, Indonesia yang gemblengan, Indonesia Merdeka yang digembleng dalam api peperangan, dan Indonesia Merdeka yang demikian itu adalah negara Indonesia yang

kuat, bukan negara Indonesia yang lambat laun menjadi bubuk.

Berhubung dengan itu, sebagai yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi, barangkali perlu diadakan noodmaatregel, peraturan bersifat sementara. Tetapi dasarnya, isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya, haruslah Panca Sila.

Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus Weltanschauung kita. Entah saudara-saudara mufakatinya atau tidak, tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. Untuk membentuk nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam peri-kemanusiaan; untuk permufakatan; untuk sociale rechtvaardigheid; untuk ke-Tuhanan.

Panca Sila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Tetapi, saudara-saudara, diterima atau tidak, terserah saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsyaf-insyafnya, bahwa tidak satu Weltaschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan!...” (“Lahirnya Pancasila, 1947: 38-39).

Dunia makna yang dipantulkan oleh Pancasila akan sangat beragam sesuai dengan kadar penangkapan individu. Adalah fitrah manusia untuk mengungkapkan makna atas sesuatu yang diperolehnya.



Sumber Foto: google.com

Dimensi Kehidupan

Dimensi ini merupakan hakikat Pancasila yang bersandar pada elemen hidup. Yang hidup berbeda dengan yang mati. Pancasila bukanlah benda mati, dan janganlah bersandar kepada sesuatu yang mati. Sehingga hakikatnya Pancasila adalah jiwa bangsa yang terus-menerus hidup. Menghidupkan Pancasila berarti masuk dan melebur dalam kehidupan kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara sempat bertanya juga mengapa Pancasila begitu populer dan mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Dia menjawabnya dengan kalimat, "karena di dalamnya dapat diketemukan sifat-sifat pokok daripada keluhuran dan kehalusan hidup manusia, baik dipandang dari sudut keagamaan, maupun sudut kebudayaan dan kemasyarakatan dalam arti yang seluas-luasnya" (1950: 3-4).

Memang, sejak proklamasi dikumandangkan, kita belum melihat Pancasila betul-betul dimaknai dalam laku sebagian kita. Pancasila sampai hari ini masih menjadi permainan bibir semata, sementara maknanya dalam hidup entah hilang ke mana. Prinsip-prinsip luhur Pancasila banyak diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sulit sekali membayangkan masa depan Indonesia menjadi lebih baik, jika kita sendiri tidak memiliki komitmen secara konsekuen dan konsisten untuk membumikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, kita pun sadar bahwa ideologi-ideologi partikular dan ekstrem sifatnya selalu menghantui kebersamaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sejarah telah mencatatnya, bahwa gerakan Komunisme-Marxisme, gerakan DI/TII, pernah berupaya untuk menggantikan posisi Pancasila, tetapi gagal. Hal ini pasti gagal, walaupun mampu bertahan, ia tidak akan lama dan hanya bertahan dalam skup paling kecil.

Hal ini tidak lain disebabkan oleh kimiawi bangsa kita yang tidak cocok dan menolak dengan sendirinya sikap dan ideologi ekstrim, baik itu kanan, kiri, maupun tengah. Secara singkat dapat kita katakan bahwa bangsa Indonesia bukanlah tanah yang subur bagi segala ideologi yang ekstrim. Hal ini dapat kita lihat tampak bagaimana sejarah menunjukkan bahwa jiwa bangsa ini sesungguhnya menolak segala macam ekstremisme bagaimanapun bentuk dan rupanya.

Namun, yang patut kita ingat dan catat adalah bahwa ideologi-ideologi itu akan tetap hidup, muncul secara tiba-tiba, dan temporal selama apa yang tertulis dalam Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi semua, tidak pernah turun dan tumbuh di bumi Nusantara ini. Bahkan, lebih menyedihkannya lagi, Pancasila seringkali hanya menjadi gincu sebagian elite kita untuk meneguhkan eksistensi personalnya dengan mengabaikan eksistensi bangsa ini secara



keseluruhan. Jauh lebih dalam, Pancasila di sisi mereka tidak lebih adalah tameng politik untuk mendapatkan dan mengukuhkan kekuasaan semata untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya semata. Hal-hal seperti inilah yang seolah membuat Pancasila “*jauh panggang daripada api*” dan pada akhirnya bangsa ini menemui kesulitan yang luar biasa untuk bangkit secara otentik dan terhormat sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Beruntunglah generasi yang mengalami peristiwanya secara langsung. Mereka mengikuti perkembangan Pancasila dalam kurun yang sangat dekat dengan momentumnya. Apa yang disampaikan oleh orang pertama atas suatu kisah menjadi sangat hidup, karena dia menyaksikannya. As’ad Said Ali mengungkapkannya dengan kalimat bahwa para pendiri bangsa berusaha menghadirkan “bangsa Indonesia” sebagai sesuatu yang nyata dan diterima sebagai apa adanya (2009: 57). Menghadirkan sesuatu yang belum ada menjadi nyata hanya dapat dirasakan oleh saksi mata (*phenomenon of first person*). Bisa kita simak kesaksian Muhammad Yamin atas peristiwa 1 Juni hari lahir Pancasila. Sebagai orang yang terlibat langsung peristiwanya, pidato tahun 1958 tersebut seperti kisah yang hidup.

“Marilah saya gambarkan kini suasana nasional dan internasional pada tanggal 1 Juni 1945 itu. Yang hadir dalam rapat itu adalah 68 anggota orang Indonesia. Adalah dua orang yang memimpinnya yaitu yang pertama almarhum Dr. Radjiman Wediodiningrat dengan didampingi oleh R.P. Suroso. Ruangan itu dibagi atas sayap kiri dan sayap kanan yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri Ketua Dr. Radjiman. Tiap-tiap sayap dibagi atas beberapa rentengan kursi, dan tiap kursi dibagi atas dua tempat. Bung Karno duduk di sayap kiri, di kursi yang paing kiri dan di tempat yang paling kiri pula. Walaupun namanya dimulai dengan huruf S. yang hadir pada waktu itu ialah diantaranya Dr Moh. Hatta, bekas Wakil Presiden dan Mr. Sartono yang sekarang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kyai Masjkur ikut hadir dan juga Dr. Soekiman Wirjosandjojo bersama-sama empat orang pemimpin Indonesia lain yang telah wafat:

K.H.A. Wachid Hasjim, H.A. Salim, K. A. Sanusi dan Dr. Samsi. Daripada pemuda yang akan menjadi calon pendobrak Proklamasi adalah 3 orang yang hadir yaitu Yang Mulia Menteri Veteran Chairul Saleh, Saudara Adam Malik, Saudara Soekarni Anggota Dewan Nasional dan beberapa orang lagi yang nanti bersama-sama akan mendobrak Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari 68 orang itu sampai hari ini sudah 18 orang yang telah meninggal. Jadi tinggal lagi yang masih hidup 50 orang.

Dari 50 orang itu adalah pada waktu ini 4 orang di luar negeri yaitu Mr. Alex Maramis Duta Besar Indonesia di Moskow, Mr. Susanto Tirtoprodjo Duta Besar Indonesia di Paris, Mr. Achmad Soebardjo Duta Besar Indonesia di Swiss, dan Saudara Adam Malik anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang pada waktu ini kebetulan ada di luar negeri. Dokumen para hadirin telah saya sampaikan kepada Kementerian Penerangan yaitu yang ditulis dalam huruf Romawi dan Katakana.

Satu persatu saya pelajari nama 50 orang yang masih hidup itu. Dengan rasa bangga saya melihatnya, bahwa dari anggota yang masih hidup tiadalah satu orang yang mengkhianat kepada Republik atau yang menyeleweng ke pihak Belanda. Dari masyarakat kaum sahabat Pancasila yang menghadiri rapat Pejambon pada tanggal 1 Juni 1945 itu benar-benar meninggalkan dengan rasa kebanggaan suatu bingkisan budi yang teguh dan kuat dalam perjuangan Revolusi 13 tahun yang lampau...” (Kementerian Penerangan RI, 1958: 8-9)

Meski begitu, sebagai generasi hari ini, kita sesungguhnya juga beruntung karena telah diwarisi sebuah konsepsi yang begitu dalam dan mengandung makna filosofis tinggi yang mencerminkan bangsa Indonesia. Kita hanya perlu sungguh-sungguh secara konsekuen dan konsisten untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam setiap kehidupan sehari-hari kita dalam berbangsa dan bernegara. Hanya dengan itu, kita juga bisa merasa beruntung sebagai generasi hari ini.

Mata rantai Pancasila tidak boleh putus. Jejaring dan sanad/genealogi pengetahuan ini terhubung dengan sistem yang ada. Pancasila harus senantiasa mau untuk berdialektika dengan nilai-nilai moral, etika, dan sumber hukum yang lain untuk memperkaya daya jangkau tafsiran dan pemaknaannya. Hal ini dilakukan agar Pancasila mampu hadir untuk setiap jaman dan kondisi bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila tidak hanya dipandang dari kacamata masa lampau yang jauh dari kehidupan generasi hari ini.

Pada dimensi ini, kehidupan bangsa Indonesia menjadi ladang keilmuan Pancasila. Dia mencakup eksistensi manusia Indonesia yang hidup di bumi nusantara. Pancasila hidup dalam jiwa bangsa Indonesia dan eksis dalam wilayah dan ruang hidup Indonesia.





Sumber Foto: google.com



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

C Pancasila Keniscayaan Indonesia

Negara sebagai bentuk formal, di mana sebuah bangsa mendiami dan hidup di dalamnya seperti bejana dan air yang mewedahnya. Indonesia sebagai negara bangsa (*nation state*) dalam bentuk negara kesatuan menempatkan Pancasila sebagai manifestasi jiwanya. Sehingga kebutuhan berbangsa dan bernegara meniscayakan konsep sederhana yang mempersatukan bagian-bagian yang membentuk keduanya.

Perbedaan generasi pendahulu, sekarang, dan yang akan datang hanya dipisahkan oleh waktu. Eksistensinya pada dasarnya sama, manusia yang menjalani kehidupannya sepanjang dia eksis. Seandainya Pancasila tidak pernah hadir pada saat itu, kebutuhan generasi bangsa tetap akan mencari dasar-dasar yang mempersatukan segala perbedaan yang dihadapi sekarang. Oleh karena itu, kita berpatokan atas sejarah yang telah menuliskan

bahwa pendahulu pernah melakukan hal yang *genuine* untuk menyelesaikan problem pelik dasar negara. Secara praktis ini memudahkan kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang dan seterusnya. Tegasnya jika diberikan kertas kosong, bagaimana kita akan menuliskan dasar negara bila tidak pernah ada contoh sebelumnya? Hal inilah yang memerlukan perenungan mendalam.

Dalam realitasnya, bangsa Indonesia menjalani kehidupannya telah melalui masa yang panjang dan turun temurun. Alam dan sistem kehidupan yang dikembangkan telah secara otomatis menjadi ruang belajar. Bagaimana seorang anak Indonesia menjalani kehidupannya telah diletakkan pondasinya oleh keluarga dan lingkungannya secara alamiah. Sistem besar yang menciptakan penghormatan kepada orang tua, guru, tetangga, orang lain merupakan contoh keteladanan yang paling *genuine*. Hal tersebut mengalir begitu saja dan watak serta karakter bangsa terbentuk.

Hingga muncul berbagai istilah dan konsep yang menunjukkan apa yang mengalir begitu saja



menjadi bahasa yang diutarakan dan kemudian diperbincangkan. Pada tingkat tertentu istilah yang diperbincangkan dalam kehidupan yang mengalir begitu saja ditemukan dan dirasakan tepat memenuhi rasa dan pengetahuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan terdekat kita, bahkan mengalir jauh melampaui sekat dan melintasi dusun dan lautan Nusantara. Bahwa terdapat kosakata dan pengertian yang bisa diterima oleh segenap jiwa raga bangsa Indonesia. Hal ini seperti kebaikan yang hidup dan setiap orang tidak pernah menolak kebaikan, meskipun sulit untuk mengatakannya.

Hal inilah yang terjadi dengan Pancasila. Apakah kita akan menolak nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan? Meskipun kita tidak mampu merumuskannya, tetapi kita tidak akan mampu untuk menolaknya. Salah satu kuncinya ialah nilai-nilai tersebut begitu dekat dan bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita segenap bangsa Indonesia.

Kenyataan ini, sebagaimana telah disebut sebelumnya, tidak lepas bahwa Pancasila itu adalah ruh bangsa Indonesia itu sendiri, dia tidak diciptakan melainkan digali dari relung paling dalam jiwa bangsa ini. Atas dasar itulah Pancasila kemudian dirumuskan dalam konsep-konsep yang universal sifatnya. Ini tidak lain untuk menjawab kenyataan bahwa segala entitas subkultur yang ada pada bangsa ini hanya mampu disatukan dengan nilai-nilai yang dapat diterima semua pihak, dan nilai itu adalah bagian dari dirinya. Seperti ungkapan Roeslan Abdulgani yang menilai bahwa ideologi Pancasila bukan sesuatu yang asing dari bangsa Indonesia. Ia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat desa di berbagai belahan Indonesia yang sudah berurat akar (1998: 45). Dengan bahasa lain Ki Hajar Dewantara mengutarakannya dengan:

“Pancasila tak kurang dan tak lebih menunjukkan sifat keluhuran serta kehalusan budi bangsa kita, menggambarkan dengan singkat, namun jelas, apa yang hidup di dalam jiwa bangsa kita. Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa: bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran dan kehalusan

hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar peri kemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan ciptaan Tuhan” (1950: 1)

Kita tidak bisa membayangkan Pancasila itu dirumuskan dalam konsep-konsep yang partikular dan partisan, jika itu terjadi, niscaya kita tidak akan pernah menemukan Indonesia hari ini. Dalilnya jelas, keragaman yang kaya ini pasti akan terpecah berkeping-keping jika dasar negaranya hanya menjiwai satu kelompok tertentu saja, padahal dalam realitasnya kita telah menemukan bahwa bangsa Indonesia ini entitasnya beragam dan berbeda-beda.

Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan berbangga dengan pendahulu kita yang memahami dengan betul tentang kenyataan dan realitas bangsa Indonesia ini. Para pemikir dan ulama Islam, misalnya, dengan suka rela dan ikhlas menerima penghapusan tujuh butir kata pada Piagam Jakarta demi maslahat yang lebih besar yakni persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi kelompok. Toh, pada hakikatnya sila pertama dan sila-sila yang lain tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam dan agama yang lain, bahkan sebaliknya nilai-nilai universal Pancasila itu diharuskan untuk diperjuangkan. Pemahaman ini sesungguhnya relevan dengan dimensi pemaknaan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila adalah keniscayaan Indonesia itu sendiri. Terkait hal ini akan dibahas berikutnya di bagian pemaknaan sila-sila Pancasila.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

03

Memahami Makna Pancasila

Dalam keseharian kita sering muncul sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Pikiran kita mengenalinya dengan istilah atau nama sesuatu. Masalahnya sesuatu tersebut ada yang hanya berkuat dalam pikiran kita dan tidak menemukan rujukan atau buktinya di dunia nyata. Ada juga sesuatu yang kita temukan atau rasakan tersebut, tetapi kita sulit menyebutkannya atau tidak mengenalinya meskipun dia ada. Contohnya, sesuatu yang kita kenali sebagai air. Kita mengetahuinya dengan penyebutan air dan memang dalam kenyataannya kita menemukan ada sesuatu benda cair. Pada dimensi materi tentu ini lebih mudah dipahami. Pikiran kita bekerja atas dasar panca indera yang mudah mengenali sesuatu yang bersifat kebendaan.

Pada peristiwa lain, pikiran kita bekerja untuk mengenali sesuatu yang tidak berbentuk materi karena dia tidak mudah dikenali oleh panca indera. Namun, pikiran kita mengenalinya dengan baik karena dia terlintas dalam pikiran kita meskipun tidak ditemukan dalam

kenyataannya seperti konsep-konsep dalam rumus matematika.

Atau sesuatu yang ada dalam pikiran kita, tetapi tidak mudah untuk menemukannya di dunia nyata. Kita meyakini sesuatu tersebut ada buktinya tetapi tidak mudah untuk menunjukkannya seperti halnya benda-benda di sekitar kita. Dia membutuhkan proses pemikiran dan perenungan agar apa yang kita ketahui betul-betul ada buktinya di dunia yang nyata seperti konsep-konsep kebaikan, keteladanan, dan sebagainya. Contoh terakhir ini erat kaitannya dengan soal hukum, etika, agama, dan sejenisnya.

Pada kesempatan lain, kita merasakan sesuatu yang terjadi dan sangat membekas dalam diri kita sehingga memberikan pengaruh yang kuat. Namun, kita kesulitan untuk menceritakan peristiwa tersebut atau seringkali kita mengatakan dengan istilah 'tak dapat diungkapkan dengan kata-kata'. Bahkan pikiran pun tidak mampu untuk mengulangi peristiwa tersebut dengan derajat yang



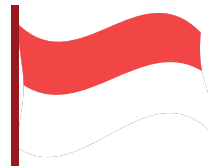
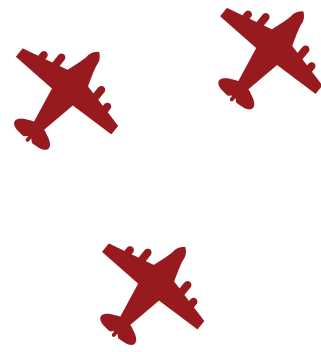
sama efeknya. Apa yang dirasakan diri kita pada peristiwa itu dengan apa yang kita ceritakan pada yang lain atas peristiwa itu tidak pernah mampu mencapai keadaan yang sama. Kondisi ini seringkali terjadi pada aspek-aspek kejiwaan seperti hadirnya semangat, rasa takut, cinta, dan lain sebagainya. Hal ini pula lah yang membuat situasi kebatinan yang dihadapi para pendiri bangsa pada saat merumuskan Pancasila tidak pernah sama dengan kita yang hanya mendengarkan kisahnya.

Kondisi-kondisi pengetahuan yang beragam demikian itu perlu diletakkan pembahasannya atas apa yang terjadi dengan Pancasila. Bagian ini menjelaskan bagaimana caranya memahami Pancasila sebagai objek gagasan dan kenyataan yang dihadapi bangsa Indonesia. Terdapat kesulitan menetapkan Pancasila sebagai bagian dari diri kita dan juga sebagai objek pengetahuan. Sekaligus kesulitan untuk memberikan bukti yang memperkuat keberadaan Pancasila.

Mulyadhi Kartanegara menyitir kesulitan epistemologis ini karena pandangan dunia pengetahuan yang cenderung pada pembahasan objek fisik-empiris yang lebih mudah untuk diteliti secara objektif dan karena itu bisa diverifikasi kebenarannya. Sementara itu objek nonfisik tidak mudah dibuktikan secara objektif dan memerlukan kualitas subjektif yang beragam. Menurutnya pandangan yang memisahkan pengetahuan fisik dan nonfisik perlu diintegrasikan sebagai objek pengetahuan yang lebih luas (2005: 59). Hal ini diulas oleh Anton Bakker bahwa pengetahuan manusia bermakna hubungan dirinya dengan dunia kenyataan yang membentuk ide dan kesadaran. Untuk itulah perangkat pengetahuan yang dimiliki manusia memiliki kadar kemampuannya mulai dari alat inderawi, naluri, rasio dan intuisi imajinatif (1990: 21-26). Sehingga penggunaan perangkat pengetahuan tersebut dapat mengungkap pemahaman kita atas dimensi lahiriyah, intelektual, dan batiniah spiritual kita atas Pancasila menjadi tepat kiranya.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



A

Logika Pancasila

Pancasila sebagai gagasan seringkali dikaitkan dengan berbagai gagasan lainnya. Ide universal Pancasila memerlukan uraian logika yang mampu menjawab kaitannya dengan aspek-aspek lain seperti misalnya hubungannya dengan kemajemukan empiris, relasi ideologi, relasi dengan agama, gagasan sebagai falsafah bangsa. Seringnya kita mendengar Pancasila sebagai filsafat seperti sila-sila Pancasila saling berkaitan antara pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama masyarakat bangsa (Fokky Fuad Wasitaatmadja dkk: 110-111). Roeslan Abdulgani pernah mengungkapkan tingkatan pemberlakuan Pancasila yang dimulai dari falsafah negara (*staat filosofie*) menjadi pandangan hidup (*leben anschaung/ weltanschaung*) menjadi suatu rangkaian cita-cita dan gagasan ideologi (a set of idea and ideas) kemudian diendapkan menjadi dasar negara (1998: 54-55). Memahami kalimat seperti ini dapat dimulai dengan pemahaman logika.

Kata Pancasila dapat dipastikan menjadi kata yang sangat familiar bagi segenap bangsa Indonesia. Dia singgah dan bahkan melekat serta menetap dalam pikiran kita. Tanyakan saja kepada setiap orang dewasa WNI bahkan anak-anak tentang apakah pernah dirinya mengetahui Pancasila? Tentu saja jawabannya adalah tahu dan pernah mengetahui Pancasila. Secara teknis logika, sesuatu yang singgah dan memberikan sebuah gambaran dalam pikiran seseorang, maka dia telah memiliki ilmu tentangnya. Terdapat kondisi yang berubah dari yang semula tidak tahu menjadi kenal tentang sesuatu itu. Inilah yang dinamakan dengan ilmu, "gambaran yang hadir dalam benak pikiran manusia".

Pada tingkat berikutnya adalah tahapan definisi dari Pancasila. Kita dapat memberikan pengertian yang beragam guna menetapkan arti dari Pancasila dengan berbagai pendekatan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, atau terdiri dari lima sila, atau ideologi negara atau apa saja yang mampu mendekatkan pengertian dari kata Pancasila kepada kita. Hal ini dapat dibenarkan sepanjang kesimpulan yang ditetapkan sesuai dengan tingkat penalaran

yang dimiliki tiap-tiap orang.

Hubungan suatu kata dengan makna yang dimilikinya memiliki derajat yang berbeda-beda. Termasuk Pancasila yang memiliki makna yang khusus tidak yang lain. Pancasila yang dimaksud bukanlah benda, bukan juga bagian dari klasifikasi tertentu. Tentu yang dimaksud adalah makna sesuatu yang khusus. Jika dikaitkan dengan uraian sila-sila di dalamnya maka relasinya adalah hal tersebut bagian dari Pancasila. Pancasila terdiri dari lima sila, sebaliknya lima sila itu adalah bagian dari Pancasila. Sunarjo Wreksosohardjo menyatakan kelima sila Pancasila adalah satu kesatuan kebulatan yang utuh. Bahwa "Kelima sila Pancasila itu ibaratnya sebuah jala. Apabila salah satu bagian dari jala itu diangkat, maka terangkatlah semuanya karena jalan yang luas dan lebar itu sebenarnya adalah satu barang, demikian pula kelima sila Pancasila" (2004: 42). Dengan hal ini dapat kita pahami pernyataan Notonagoro, saat pidato promosi honoris causa oleh Senat UGM kepada Soekarno, bahwa Pancasila adalah hasil perenungan mendalam berdasarkan basis ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban ilmiah ini dalam pengertian Pancasila merefleksikan dan mencitrakan cita-cita bangsa Indonesia dan hubungan antar sila-sila Pancasila dalam satu kesatuan yang solid (Aning Floriberta, 2017: 31).

Dalam Ilmu Logika, hubungan atau relasi antar konsep itu ada empat. Empat relasi konsep ini berguna sekali untuk memahami hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain sehingga memudahkan untuk kita tiba pada sebuah kesimpulan tentang hubungan konsep-konsep tersebut. Konsep relasi akan berguna untuk melihat hubungan antar dua pengertian atau istilah misalnya antara Pancasila dan agama. Bahkan kita akan menemukan mereka dalam satu relasi yang saling menguatkan.

1
Pertama, relasi yang biasa disebut relasi ekuivalen atau sama/setara. Hubungan antar konsep universal satu sama lain ekuivalen atau tidak berbeda. Dengan kata lain, sebuah konsep universal bisa juga diterapkan pada satuan universal yang lain. Misalnya, konsep manusia dan berpikir. Hal ini karena setiap yang berpikir itu manusia dan setiap manusia itu berpikir.

2
Kedua, relasi berbeda/kontradiksi. Hubungan antar konsep universal satu sama lain berbeda bahkan bisa kontradiktif. Misalnya, konsep manusia dan batu. Manusia bukanlah batu, dan batu bukanlah manusia. Relasi ini disebut relasi berbeda non-kontradiktif atau kontradistingsi, berbeda tetapi tidak bertentangan satu sama lain, alias tidak saling menafikan/oposisi. Ada juga relasi berbeda kontradiktif. Misalnya, konsep baik dan tidak baik. Dua konsep ini berbeda dan saling bertentangan satu sama lain. Sederhananya kami contohkan dalam sebuah kalimat, "Purbo adalah anak baik" dan dipertentangkan dengan "Purbo adalah anak tidak baik". Mustahil bagi Purbo dalam satu waktu dan kondisi bisa baik dan tidak baik sekaligus.

3
Ketiga, relasi irisan. Hubungan antar konsep universal satu dengan konsep yang lain bisa bertemu dalam satuan universal yang lain dan sebagiannya lagi tidak. Misalnya, konsep manusia dan konsep putih. Kedua konsep universal tersebut bersatu pada seorang manusia yang putih, tetapi terkadang keduanya berpisah seperti pada orang yang hitam dan pada kapur tulis yang putih.

4
Keempat, relasi dominasi. Dua konsep universal yang satu dapat diterapkan pada seluruh satuan universal yang lain dan tidak sebaliknya. Misalnya, konsep hewan dan konsep manusia. Setiap manusia adalah hewan dan tidak setiap hewan adalah manusia. Satuan konsep hewan lebih umum dan lebih luas sehingga mencakup semua satuan konsep manusia.

Dengan logika, kita juga mampu menunjukkan duduk perkara yang menyebabkan kesalahan berpikir. Seperti anggapan seolah-olah Pancasila dan agama adalah pandangan hidup yang setara sehingga didudukan secara setara dengan mempertentangkannya. Baik Pancasila dan agama jelas memiliki bagian kesamaan dan perbedaan. Keduanya tidak kontradiktif dan menafikan satu sama lain. Justru keduanya terlihat jelas bisa saling menguatkan dan berjalan beriringan. Logika juga membantu membuang watak terburu-buru dan bernafsu dalam menyatakan pendapat.

Terkait hal di atas, proposisi atau konsep dapat bertentangan atau dipertentangkan apabila memenuhi syarat kesamaan dalam delapan aspek dan berbeda dalam dua aspek, yakni aspek kuantitas dari segi universalitas/partikularitasnya dan aspek kualitas dari segi afirmasi/negasinya. Lalu apa saja delapan aspek yang harus sama tersebut?

1 Aspek subjek: kalimat ‘bangsa Indonesia butuh keadilan’ tidak bertentangan dengan ‘agamaan butuh keadilan’.

2 Aspek predikat: kalimat ‘manusia butuh keadilan’ tidak bertentangan dengan ‘manusia bersatu’. Kontradiksi tidak terletak pada proposisi “benar” vs “salah”, melainkan “benar” vs “tidak benar”. Predikatnya sama, yaitu ‘benar’. Perbedaan terletak pada membenaran (afirmasi) dan penolakan (negasi), yang juga merupakan syarat bagi terjadinya kontradiksi atau pertentangan.

3 Aspek Waktu (zaman): kalimat ‘Pancasila jadul dan modern’ tidaklah kontradiktif jika kondisi jadul bagi Pancasila mengacu pada masa kelahirannya, sedang kondisi modern mengacu pada masa hari ini dia masih digunakan.

4 Aspek tempat: kalimat ‘Pancasila umum dan khusus’ bukanlah proposisi kontradiktif jika kondisi umum bagi Pancasila mengacu pada konteks keragaman yang ada di Indonesia, bahwa Pancasila adalah dasar negara yang universal sifatnya sehingga mencakup segala entitas yang beragama yang eksis di Indonesia, sedang kondisi khusus mengacu bahwa Pancasila hanya berlaku dalam konteks Indonesia semata sebagai dasar negara bagi seluruh warga Indonesia.

5 Aspek kondisi/anteseden: kalimat ‘jika diaktualisasikan, Pancasila akan membumi’ tidaklah bertentangan dengan ‘jika dikonsepsikan, Pancasila akan melangit’.

6 Aspek relasi: kalimat ‘Pancasilais baik dan Pancasilais jahat’ tidaklah kontradiktif jika yang dimaksud pada kata baik adalah untuk orang-orang yang mengamalkan Pancasila secara jujur dalam kehidupan dan kata ‘jahat’ mengacu pada mereka yang menggunakan Pancasila sebagai hiasan bibir untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan semata.

7 Aspek seluruh-sebagiannya: kalimat ‘Pancasila melangit tapi membumi’ tidak bertentangan atau kontradiktif jika ‘melangit’ mengacu pada seluruh aspek ontologi dan epistemologi Pancasila, sedangkan “membumi” hanya mengacu pada aspek aksiologinya.

8 Aspek potensi-aktualitasnya: kalimat ‘Pancasila sederhana tetapi kompleks’ tidak kontradiktif jika ‘sederhana’ mengacu pada saat Pancasila dilihat dari aspek lima silanya yang ringkas dan padat (yang berpotensi untuk dimaknai dan ditafsirkan) dan ‘kompleks’ mengacu secara aktual pada saat ini ketika sudah ditafsirkan dalam bentuk laku, buku, dan susunan pemaknaan lainnya.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

Sementara itu, dalam logika, makna terbagi menjadi dua, konsep dan ekstensi. Konsep adalah makna yang ada di dalam pikiran, sementara ekstensi adalah makna yang berada di luar pikiran. Misalnya, kita gunakan contoh "manusia". Manusia memiliki individu-individu di luar pikiran seperti Made, Jaka, Rohmat, dan sebagainya. Manusia adalah konsepnya, sementara individu seperti Made, Jaka, Rohmat, dan sebagainya, adalah ekstensi atau realitas nyata dari konsep manusia.

Konsep sendiri terbagi menjadi dua, partikular dan universal. Konsep partikular adalah konsep yang hanya memiliki satu ekstensi. Misalnya Jakarta, maka kita akan menemukan realitas di luar hanya ada satu Jakarta, sebuah wilayah di bagian barat pulau Jawa dan memiliki monas sebagai ikonnya. Sementara konsep universal adalah konsep yang memiliki banyak ekstensi atau banyak realitas di luar. Misalnya manusia, maka kita akan menemukan banyak individu-individu manusia dengan nama Jupri, Acong, Sirait, dan sebagainya di realitas luar. Atau contoh lain hewan, maka kita akan menemukan sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya, yang masuk kategori hewan.

Dengan demikian, Pancasila adalah sebuah konsep universal abstrak yang memiliki entitas di luar. Entitas tersebut beragam, jamak, dan plural. Karena konsepnya yang universal dan terkandung dalam setiap silanya, maka Pancasila pada akhirnya mampu menjadi perekat dan pemersatu setiap entitas yang berbeda tersebut dalam satu naungan kebangsaan bernama Indonesia. Sehingga, Pancasila menjadi niscaya adanya bagi Indonesia. Menafikan Pancasila sama saja menafikan segala realitas yang beragam dan eksis di Indonesia. Menafikan realitas tersebut, meski satu saja, hanya untuk meninggikan realitas yang lain akan menjadi sebab bagi hancurnya Indonesia sebagai bangsa dan negara. Meski begitu, karena sifat Pancasila yang universal dan memiliki realitas di luar, maka Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip moral agama dan sosio-kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Untuk membantu memahami kedudukan Pancasila ini dapat dijelaskan dengan memahami bagaimana pikiran kita bekerja. Pikiran kita dapat memahami sesuatu dengan memverifikasinya dengan tiga cara: *Pertama*, dengan indera kita yang menghasilkan bentuk pengetahuan sederhana empiris. *Kedua*,

dengan logika yang hanya menjadi alat bantu pikiran semata. *Ketiga*, dengan cara penggalan makna yang tidak serta merta dapat ditemui dalam realitasnya, tetapi pemahaman kita merupakan refleksi atau abstraksi atas realitas.

Jika ditanyakan di mana kah kita dapat menemukan Pancasila? Kemudian dijawab dia dapat ditemukan dalam buku, tulisan, spanduk dsb., maka ini menggunakan cara pertama. Jika jawabannya dia hanya ada dalam pikiran semata, maka dia menggunakan cara kedua. Jika jawabannya menggunakan cara ketiga maka ini memerlukan kerja keras perenungan pikiran. Pancasila adalah spirit, dasar negara, falsafah bangsa, bintang penuntun, alat pemersatu dll., merupakan refleksi atas cara ketiga.

Mengingat Pancasila adalah penggalan makna dari realitas bangsa Indonesia, secara logika dikatakan terdapat makna universal yang bisa diterapkan kepada realitas yang beragam. Dalam kerangka logika inilah maka hendaknya pertanggung jawaban seseorang memiliki argumen yang runtut dan sah hingga tiba pada kesimpulannya. Hal inilah yang berlaku dalam hukum logika untuk menyusun narasi atau deskripsi tentang Pancasila.





Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

B

Wujud Pancasila

Memahami Pancasila sebagai sebuah ilmu pengetahuan membutuhkan uraian konseptual. Apakah Pancasila itu sebuah gagasan substansi yang tanpa wujud atukah perwujudan yang tanpa makna memerlukan upaya memahaminya sebagai objek pengetahuan. Sehingga Pancasila mudah untuk dipahami dan tidak salah mengerti karena kesulitan untuk membuktikannya. Daya yang dimiliki bangsa Indonesia dalam memahami Pancasila ditunjukkan melalui perangkat ilmu pengetahuan yang melekat dalam dirinya sebagai manusia.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

Di sisi lain, ketika kita belajar Ilmu Logika, maka seringkali kita temukan bahwa para ahli logika mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berpikir. Disebut hewan karena manusia memiliki karakteristik yang dekat dan sama dengan hewan. Misalnya, makan, berkembang biak, tumbuh, dan seterusnya. Karena kesamaan yang dekat itulah manusia dimasukkan dalam jenis hewan. Meskipun manusia dan hewan lain jenisnya adalah hewan, terdapat pembeda mendasar antara manusia dengan hewan lain tersebut. Perbedaan itu terletak pada berpikir/akalnya. Berpikir sendiri menunjuk pada aktivitas yang terjadi pada akal. Dan akal hanya dimiliki oleh manusia. Meski manusia dan hewan lainnya, seperti gajah, kambing, keledai, sapi, dan seterusnya, sama-sama memiliki otak, tetapi hanya otak manusia yang dibekali akal. Inilah kemudian yang membedakan antara manusia dan hewan lainnya. Karena berpikirlah manusia bisa berkembang. Karena berpikirlah manusia bisa mengalami evolusi peradaban yang luar biasa sejak kelahirannya sampai hari ini.

Dengan berpikir itulah manusia mampu menciptakan berbagai ilmu pengetahuan untuk membantu dan memudahkan kehidupannya. Hal yang mustahil dilakukan hewan selain manusia. Sejak kelahirannya sampai sekarang, hewan selalu melakukan hal yang sama menggunakan instingnya. Mereka tidak menggunakan akal karena tidak memilikinya, karena itulah mereka tidak bisa menciptakan peradaban sebagaimana yang dilakukan manusia.

Jika kita tengok dalam agama. Maka kita akan menemukan betapa di dalam kitab suci berpikir adalah perbuatan yang sangat mulia dan dianjurkan. Karena berpikirlah yang membedakan manusia dengan hewan yang lain. Dengan berpikir manusia bisa membedakan yang baik dan buruk. Dengan berpikir pula manusia bisa belajar dan mendalami agama, lalu mengamalkannya dalam berbagai ritual ibadah. Maka tidak heran bila kitab suci menyebut manusia yang telah diberi potensi akal, lalu enggan menggunakannya untuk berpikir, sebagai orang yang lebih sesat dari hewan ternak. Kritik kitab suci yang tidak menyamakan manusia yang tidak berpikir dengan hewan (yang memang tidak punya potensi berpikir) sangatlah tepat.

Manusia yang memiliki akal dan kehendak bebas (berpikir dan tidak), ketika memilih untuk tidak



berpikir, maka ia sejatinya telah memilih menutup potensi yang ada padanya, menutup potensi itu sama saja dengan menempatkannya lebih rendah dari hewan ternak. Sebaliknya, mereka yang berpikir dan menggunakan akalnyanya dengan tepat, Tuhan akan meninggikan kedudukannya beberapa derajat. Karena hanya melalui berpikir yang sungguh-sungguhlah sebuah ilmu pengetahuan akan muncul, dan dengan ilmu pengetahuan itu pula peradaban bisa hadir di tengah-tengah manusia. Dengan pikiran pula seseorang akan mampu memahami kemanusiaan dirinya, dalam hal ini kemanusiaan dirinya sebagai manusia Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pancasila. Ini memberikan petunjuk bahwa kemanusiaan Indonesia baru bisa dipahami dan diwujudkan ketika seseorang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang benar. Selain itu, ia juga berusaha untuk mengamalkan dan mewujudkannya dalam realitas kehidupan ini.

Dari sini, disadari bahwa aspek yang seringkali merumitkan adalah hubungannya dengan realitas kehidupan kita dengan cara ketiga seperti tersebut di atas. Sunoto dalam mengurai aspek wujud Pancasila yang dimaksud merupakan bagian dari pendekatan ontologi yang terdiri dari esensi, substansi dan realita. Esensi terkait dengan intisari kata-kata seperti kata ketuhanan, kata kemanusiaan, kata persatuan, kata kerakyatan, kata keadilan. Substansi Pancasila terkait dengan hal bukti fisik kebendaan dan atau non fisik seperti bukti tradisi atau kebudayaan (2000: 59-71). Bagaimana sila-sila Pancasila menggambarkan kemandirian masing-masing sekaligus merupakan satu kesatuan pada dunia nyata? Secara konseptual pikiran sila-sila tersebut tersusun namun dalam dunia nyata tergantung pada Tuhan (Anton Bakker, 1992: 38). Dengan kata lain pada dunia nyata semuanya bergantung pada kesempurnaan wujud Tuhan namun secara konseptual terdapat dimensi Tuhan dan dimensi manusia pada lima sila Pancasila (Daniel Zuchron, 2017: 236). Sunarjo Wreksosuhardjo menyebutnya yang ada dalam Pancasila hanya tiga hal saja Tuhan, manusia dan benda (2004: 42). Pada aspek dunia kenyataan Pancasila inilah terjadi kemusykilan yang berusaha dipahami.

Pengertian atau makna suatu kata selalu tersusun dari dua dimensi: dimensi yang dibangun dalam pikiran kita dan dimensi realitas yang ada di luar pikiran. Jika Pancasila hanya bangunan pikiran

dalam pikiran kita semata dan lepas dari realitasnya maka gugurlah makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Sesuatu kata atau istilah jika dikaitkan dengan realitasnya maka sudah masuk pada dimensi filsafat. Untuk memudahkan penjelasan baiknya kita mulai dengan keadaan yang dimiliki oleh manusia. Bahwa Manusia memiliki daya inderawi, daya imajinasi, daya rasio dan daya intuisi untuk eksistensinya. Setiap daya memiliki karakter dan implikasinya masing-masing. Keseluruhannya merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan YME. Melalui segenap daya inilah manusia membangun kesadarannya sendiri dengan diri dan lingkungannya atau dengan realitasnya. Termasuk manusia Indonesia yang terhubung dengan realitas Pancasila.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

Memahami Pancasila sebagai sesuatu yang eksis dalam pikiran dan ditemukan dalam dunia yang nyata menjadi bagian dari daya penalaran filsafat. Sebab yang dibicarakan dalam filsafat adalah sesuatu yang nyata bukan ilusi, tapi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Dia ada dalam pikiran dan karena itu bisa dijelaskan diuraikan maknanya, tapi juga bisa dibuktikan dalam dunia yang nyata dengan beragam manifestasi. Mengingat makna diambil dari sesuatu yang nyata bukan sekadar impian atau permainan pikiran semata. Dari sana kita bisa memahami ungkapan Ki Hajar Dewantara tentang Pancasila hakikatnya adalah jiwa “jiwa bangsa kita, sifat pribadi rakyat kita dalam lingkungan kenegaraan”. Jika tidak ada jiwa di dalamnya, maka UUD 1945 hanyalah tumpukan pasal semata. Pancasila itulah yang yang menghidupkan UUD (1950:1).

Melalui penalaran rasionya, Pancasila adalah konsep pikiran yang bersumber dan terhubung dengan realitasnya. Peristiwa inilah yang terjadi dalam persidangan perumusan dasar negara baik BPUPK maupun PPKI. Para pendiri bangsa berdebat, bersidang, dan bermusyawarah dengan segenap argumentasi, penalaran dan juga ekspresi jiwa yang mengedepankan kebijaksanaan yang agung. Bagi mereka, Pancasila adalah sesuatu yang tampak konkret, hadir dan mewujudkan dalam rangkaian perumusan demi perumusan. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan historis filosofis bagi generasi setelahnya untuk memahami alur pikir dan suasana kebatinan yang terus menerus dijaga dan dirawat kelestariannya.

Oleh karena itu, tidaklah salah jika ada yang memverifikasi Pancasila dalam realitasnya dalam bentuk dunia kehidupan di sekitarnya yang dekat. Contoh beragam kearifan lokal salah satunya. Menurut Armada Riyanto, kearifan lokal merupakan bentuk konkret relasionalitas manusia dengan dunia hidupnya menjadi nilai-nilai setempat. Dia tidak terbentuk dalam kurun waktu sesaat tetapi bentukan berabad-abad lamanya. Sehingga dalam proses pembentukannya dia bersifat inklusif (menyambut-membuka diri), kontekstual (sesuai dengan lingkup kehidupannya) dan tidak beku baik secara doktrinal maupun dogmatis (2015: 16). Gambaran berikutnya diilustrasikan dengan apik oleh Armada Riyanto,

“Ketika manusia-manusia yang tinggal di pesisir pantai melihat laut, produk penglihatannya ialah bahwa laut menjadi seperti seorang “ibu” bagi mereka. Sebab samudera memungkinkan mereka bisa hidup, setiap hari mengambil ikan-ikan yang membuat mereka tidak kekurangan apa-apa. Upacara “melarung” persembahkan ke laut menjadi seolah-olah ucapan syukur dan terima kasih kepada “ibu yang terus memelihara mereka. “Kekuatan“ laut dahsyat, bukan karena bencananya, melainkan karena pemeliharaan (seolah seperti seorang “ibu”) kepada hidup mereka secara terus menerus” (2015:30)..

Mengacu kepada objek pengetahuan fisik dan nonfisik, pada pembahasan ini mendapatkan gambaran bagaimana wujud Pancasila itu sangat beragam. Keragaman itu menyesuaikan dengan kapasitas individu atas realitas yang dihadapinya. Seorang guru yang menekuni dunia pendidikan akan berbeda penangkapan pemahamannya dengan seorang petani yang berlumpur dalam dunia pertanian. Seorang atlet dalam bidang olahraga mengarungi prestasinya berbeda dengan seorang insinyur dalam bidang teknik. Seorang ulama yang menekuni bidang agama akan berbeda dengan seorang pejabat yang melayani rakyat dalam bidang administrasi pemerintahan dan seterusnya. Sehingga ketika menisbatkan Pancasila dengan jargon “Saya Pancasila” atau “Pancasila adalah kita” menjadi bagian dari pemahaman wujud yang sederhana namun dikembalikan kepada lingkup dunia yang dihayati masing-masing. Pancasila sebagai produk kemanusiaan Indonesia pada akhirnya memvalidasi kenyataan dan memverifikasi pengalaman batiniah bahwa Tuhan Yang Maha Memberi Kehidupan itulah yang diyakini setiap manusia Indonesia seperti pengakuan atas sila Ketuhanan YME.

Ragam wujud Pancasila sedemikian itulah yang memvalidasi mengapa ungkapan para pendiri bangsa atas Pancasila penuh dengan penjiwaan yang terkait dengan pengalaman terdekat dan yang disaksikan mereka tentang Indonesia menjadi hidup dan relevan. Realitas Indonesia yang kaya, unik, beragam dipersatukan oleh Pancasila sebagai produk pengalaman pendiri bangsa selaras dengan semboyan bhinneka tunggal ika pada lambang burung garuda. Meskipun demikian, setelah temuan



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

tentang Pancasila konteks selanjutnya mewujudkan Pancasila dalam kehidupan nyata bukan perkara yang mudah. Suwarno mengungkapkan keberadaan Pancasila sebagai identifikasi dan idealisasi sejarah dan pemikiran generasi awal Pancasila tersebut menghadapi tantangan luar biasa dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat untuk seluruh manusia Indonesia yang mendiami kesatuan wilayah eksotik, unik, dan masif (1993: 177-178).

Dunia pendidikan yang menyesuaikan dengan alam pikiran anak didik harus mampu menyampaikan keberadaan Pancasila sesuai dengan daya yang dimilikinya. Hal inilah yang dituntut dalam dunia pendidikan bahwa kenyataan yang dihadapi oleh anak-anak yang beragam dituntun oleh pendidikan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi mereka. Ki Hajar Dewantara menyampaikan gagasan ini dengan ungkapan,

“Pertama harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu ‘tuntunan’ di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri... bahwa kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya (bukan dasarnya) hidup dan tumbuhnya itu” (2009: 3-4).

C

Pohon Karakter Pancasila

Mengaitkan Pancasila sebagai sumber penguatan karakter bangsa memerlukan sistem penjelasan yang komprehensif dan detail. Pohon karakter menjadi cerminan konseptual untuk menempatkan kerangka logis yang mudah untuk dipahami. Simbol pohon karakter menunjukkan bagian-bagian pertumbuhan seorang anak didik melalui konsep akar, batang, cabang, dahan, daun, bunga, dan buah dari sebuah ekosistem pendidikan.

Pada bagian menggali Pancasila di atas telah diuraikan betapa realitas keindonesiaan menjadi inspirasi dan pemicu terciptanya Pancasila. Bumi, tanah, air dan udara Indonesia merupakan ruang hidup yang menjalin sistem dan beragam pola kehidupan manusia Indonesia. Penemuan nilai ketuhanan hingga keadilan direfleksikan secara optimal dan diikat dengan nama Pancasila. Jika para pendiri bangsa tidak memiliki kualifikasi kecerdasan berpikir tidak mungkin kita menerima Pancasila sebagai sebuah fakta pemikiran hari ini.

Pada tingkat penerimaan yang sedemikian menyeluruh dari bangsa Indonesia inilah terdapat kesesuaian fakta bahwa Pancasila mengandung unsur-unsur metafisika yang tepat. Realitas Indonesia yang hidup dialihkan menjadi seperangkat nilai dalam bentuk sila-sila dan diikat dalam kata "Pancasila". Karena inilah Pancasila bukan agama sebagai tuntunan langsung dari langit melalui utusan-Nya. Tetapi hasil pencarian dan pendalaman para pendiri bangsa atas realitas Indonesia.





Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

Pancasila sebagai realitas akan selalu ada sepanjang bangsa Indonesia ada. Kondisinya ibarat bersembunyi dalam terang. Kita hanya perlu menyibaknya untuk mendapatkan penjelasan bahwa Pancasila itu hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia membutuhkan penyelaman, pendalaman atau penggalian apakah tumbuh subur atau gersang. Nilai-nilai yang tidak bersifat jargon, slogan, meme, poster, spanduk kata-kata atau kampanye tetapi benar-benar hidup dalam alam kenyataan. Dalam dunia pendidikan juga demikian penggambarannya. Apakah pendidikan yang memerdekakan peserta didik dapat disaksikan dari wajah-wajah ceria, penuh semangat dan hidup dalam tata perilaku sekolah yang hidup bukan penggambaran jiwa-jiwa yang lesu bahkan mati namun hinggap dalam tubuh.

Untuk mengungkap, menyibak atau menyingkap realitas yang hidup dalam alam keindonesiaan atas Pancasila tetap membutuhkan pengetahuan. Melalui pendidikan sejarah, penalaran logika dan pengungkapan bahasa kondisi tersebut dapat dicerap dan diperoleh. Sehingga masuk pada ruang formal pengetahuan yang bersifat metodis dan membutuhkan metodologi. Pendidikan yang diwakili oleh seperangkat sistem pengajaran pengetahuan mampu menampilkan metode yang membimbing peserta didik untuk memahami Pancasila. Bukan hanya bersifat kognitif pengetahuan semata tetapi mampu memicu aktivitas yang sadar dari peserta didik. Tentu saja level kesadaran peserta didik disesuaikan dengan tingkat pemahaman nalarnya. Buah dari metode pendidikan yang bersandikan kenyataan yang hidup dalam alam pikir peserta didik diharapkan menjadi sebuah nilai. Nilai yang tercermin dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif namun berbasis fakta peserta didik. Mereka tidak kebingungan untuk menerjemahkan hasil pendidikannya dalam kehidupan keseharian. Bahwa ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dalam ruang-ruang pendidikan betul-betul dapat dijumpai dalam dunia kenyataan yang dihadapinya. Bagaimana aspek kognitif, afektif dan psikomotorik tercapai dalam alam kesadaran peserta didik secara bertahap. Sehingga benar-benar pemahaman pendidikan mampu ditemukan dalam dunia kenyataan sekaligus mampu diungkapkan dalam bahasa pengetahuan secara logis dan penuh jiwa.

Dalam Pancasila sudah terdapat sejumlah butir-butir pengetahuan yang menjadi pedoman dan tuntunan. Bagaimana hal tersebut mewujud dalam perilaku dan terampil dalam bahasa pengetahuan menjadi bagian dari tantangan dunia pendidikan. Mengerti nilai ketuhanan sekaligus melakoni dirinya sebagai makhluk Tuhan, memahami kemanusiaan sekaligus menjadi manusia seutuhnya, memahami persatuan sekaligus tercermin dalam perilaku gotong royong, mengerti kerakyatan sekaligus menjalani kehidupan yang demokratis dan menjunjung keadilan sekaligus menerapkannya dalam hidup keseharian. Namun hal tersebut belum bersifat menyeluruh dan masih parsial. Teks Pancasila masih terpisah dari konteksnya. Hal ini merupakan bagian dari pengamalan pembelajaran sepanjang hayat dari peserta didik.

Berbeda dengan dunia pendidikan yang formal, masyarakat juga belajar dari kenyataan yang dihadapinya. Seperti halnya kebaikan yang hidup, sesuatu yang sangat jelas dan tidak perlu dijelaskan. Terkadang penjelasan malah mengaburkan dari makna yang ingin dituju. Hal inilah yang bisa dipahami dari kalangan rakyat yang terkadang tidak mampu atau berniat dalam perdebatan karena bagi mereka perwujudan perbuatan itulah yang paling utama. Dari sini kita bisa memahami mengapa muncul anggapan karakter (*attitude*) lebih utama dari sekadar menguasai ilmu, "adab lebih utama dari ilmu".

Dengan demikian kita tidak menjadi bingung

atas respon masyarakat akhir-akhir ini atas relasi Pancasila dan refleksi Pancasila. Dalam kehidupan yang sesungguhnya ditemukan dengan menjalankan nilai ketuhanan yang diyakininya maka dia telah menjadi Pancasila. Dengan menjalankan kodrat kemanusiaannya maka dia telah Pancasila. Menjadi jiwa pemersatu dia telah Pancasila. Selalu mengedepankan musyawarah dia telah Pancasila. Begitu telah menjalankan keadilan maka dia telah Pancasila. Inilah yang ingin disebut dengan buah atau aksiologi Pancasila.

Jika demikian halnya, maka ilustrasi yang dapat disusun untuk memahami bangunan filsafat Pancasila adalah simbol pohon karakter Pancasila. Uraian tentang menggali Pancasila menjadi bagian dari pengungkapan dimensi realitas (ontologi), memahami Pancasila merupakan bagian dari cara mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Pancasila (epistemologi) dan menyemai Pancasila merupakan perwujudan dari tindakan pendidikan mengungkap hasilnya dalam bentuk ideal (aksiologi) seperti dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Di mana dimensi ontologi/ metafisika disimbolkan seperti akarnya, batangnya yang besar adalah epistemologinya baik melalui logika, sejarah dan bahasa, serta cabang, dahan, daun dan buah adalah dimensi aksiologi nilai-nilainya. Keseluruhannya terhubung dan menjalin kesatuan sistemik Pancasila dalam konteks penguatan karakter bangsa. Melalui pohon karakter ini maka memahami Pancasila sebagai satu kesatuan sistem pengetahuan yang terdiri dari bagian-bagian di dalamnya dapat tercapai.



Pohon Karakter Pancasila



Nilai/Karakter
(Axiologi)

Logika/Bahasa
(Epistemologi)

Metafisika
(Antologi)

Alam kenyataan yang direfleksikan dalam bentuk Pancasila merupakan dasar metafisika. Untuk melukiskan pengertian metafisika, seringkali para pendiri bangsa mengungkapkannya dengan bahasa puitis yang penuh jiwa. Ki Hajar Dewantara menggambarkannya seperti perumpamaan matahari. Menurutnya tentang isi keadilan dalam Pancasila,

“Lihatlah sebagai contoh sifat sang matahari, yang telah ditetapkan oleh hukum kodrat alam, atas kehendak Tuhan menurut ajaran agama, untuk memberi sinarnya. Sinar matahari yang diperlukan untuk hidup tumbuh segala makhluk dan tumbuh-tumbuhan di seluruh alam dunia ini. Sang matahari tidak membeda-bedakan, pun matahari tidak memaksa atau melarang

digunakannya, yang bersifat sakti tadi. Matahari memberi sinarnya kepada semua tumbuh-tumbuhan dan makhluk, yang memerlukan sinarnya. Pemberian sinar matahari berlaku dengan merata dan adil. Sesuai dengan semboyan ‘demokrasi’ dan ‘keadilan sosial’ yang dapat diganti dengan ucapan “sama rata, sama rasa” (1950:32-33).

Sementara bagaimana merefleksikan kenyataan itu dapat dipahami merupakan aspek epistemologi. Logika, bahasa, dan sejarah menjadi sandaran yang mampu mengantarkan pemahaman ini. Kita menyadari bahwa ungkapan pengetahuan tercermin dari penalaran logika yang memunculkan watak kritis yang menumbuhkan ilmu pengetahuan. Artikulasi penyampaian pengetahuan melalui ketentuan bahasa yang runtut dan sistematis juga menjadi salah satu indikator penguasaan keterampilan menyampaikan pendapat dan gagasan. Objek informasi yang beragam sebagai bagian dari pengetahuan yang diperoleh merupakan esensi pengolahan informasi sejarah yang hinggap dalam pikiran. Apalagi pada era digital yang menyediakan banjir informasi dan keterbukaan informasi yang memerlukan filter dalam bentuk penalaran kritis dan penyampaian bahasa yang tepat.

Ketika dua aspek tersebut telah mampu dijelaskan maka apa guna dan bentuk yang dapat dirasakan menjadi bagian dari aksiologi. Dia harus konkret terasa dan memiliki nilai kegunaan. Uraian yang panjang tentang makna Pancasila dan sila-silanya dibantu dengan cara menguraikan hasilnya merupakan buah dari pemikiran komprehensif. Pohon karakter Pancasila pada dasarnya bagian dari siklus ilmu pengetahuan yang tercermin dari pohon pengetahuan (*tree of knowledge*).

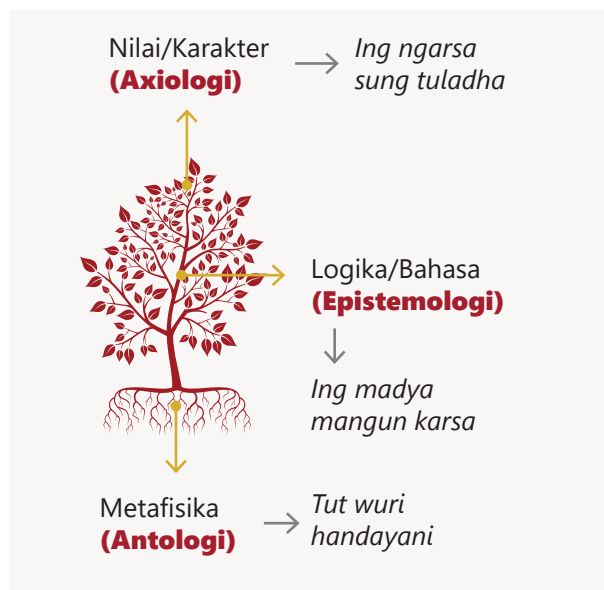
Bagaimana dunia pendidikan menjadi sangat vital dan urgen untuk menciptakan lingkungan pendidikan (*epistemic community*) tidaklah berlebihan karena itulah esensi dari pendidikan itu sendiri, menciptakan manusia yang sesungguhnya dan seutuhnya. Sehingga membayangkan pohon karakter Pancasila dengan dunia pendidikan di Indonesia menjadi lebih dekat dan bahkan identik. Misalnya jika mengacu pada trilogi pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara dan mengaitkannya dengan pohon karakter Pancasila dapat diterjemahkan dalam dimensi yang sama.

Ajaran Ki Hajar Dewantara tentang *Tut Wuri Handayani* meletakkan gagasan metafisika/ontologi pendidikan dimana dukungan penuh atas potensi peserta didik diwujudkan dalam semesta pendidikan yang tidak nampak. Bahwa sejatinya guru adalah pendukung utama peserta didik dari belakang. Guru merupakan pribadi dan simbol yang selalu mengikuti dari belakang dan selalu

mendorong peserta didik menggapai cita-citanya. Semesta ini menjadi hal yang kodrati bahwa guru selalu mendukung apapun kemajuan bagi peserta didik baik diungkapkan ataupun tidak.

Ajaran *Ing Madya Mangun Karsa* menyiratkan dukungan yang nampak oleh guru terhadap peserta didiknya dalam bentuk motivasi, metode pendidikan, manajemen pendidikan. Kehadiran guru bagi peserta didiknya merupakan pendamping setia untuk selalu menciptakan inspirasi, membangun motivasi dan mengarahkan kepada metode mencapai pengetahuan peserta didik. Dalam kerangka inilah bangunan pohon karakter Pancasila yang bersifat epistemologis mendapatkan tempat dengan pemberian pengetahuan kognitif logika, bahasa dan informasi sejarah.

Ajaran *Ing Ngarsa Sung Tuladha* merupakan buah yang dapat dinikmati oleh peserta didik dengan mudahnya mendapatkan keteladanan atau pemberian contoh yang disimbolkan gurunya. Mereka tidak kesulitan mencari sosok ideal yang bisa dijadikan patokan keteladanan yang diperoleh dari gurunya. Kehadiran gurunya adalah wujud keilmuan yang mudah untuk diikuti. Tanpa keteladanan dan sosok yang dekat bagi peserta didik akan menyulitkan mereka untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam lingkungan yang mereka hidup dan belajar di dalamnya. Dalam konteks inilah pohon karakter Pancasila yang bersifat aksiologis diterapkan dalam dunia pendidikan.





Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

04

Menyemai nilai-nilai Pancasila

Bagian ini menjelaskan kerangka terapan atas nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang implementatif. Setelah kita mengenal dan mengetahui bahwa Pancasila adalah sesuatu yang jelas dan nyata adanya serta memahami alur pikir atas keberadaan Pancasila, maka mengungkap sejumlah makna dalam bentuk saripati gagasan dan nilai-nilai yang dikehendaki menjadi lebih mudah. Hal ini tidak lepas dari kenyataan historis dan berbagai rumusan yang ada merupakan turunan pemikiran Pancasila yang hendak diwujudkan.

Pada dua bagian sebelumnya telah diuraikan bagaimana lahirnya Pancasila dalam wujud seperti yang disaksikan sekarang. Mengetahui bahwa Pancasila itu merupakan cerminan dan perwujudan sikap bangsa bukanlah karangan semata. Dia menjadi gagasan yang cocok dan terbukti mampu mengikat bangsa Indonesia dalam lingkup negara yang dicita-citakan. Begitu juga alur pikir yang melandasi mengapa Pancasila lahir sekaligus metode pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami filsafat

Pancasila. Hal itu dapat membekali dunia pendidikan, khususnya sekolah dasar, mengembangkan cara-cara pendidikan yang sesuai dengan alam pikir anak didik atas Pancasila.

Dari sanalah kita memahami mengapa negara diperlukan, konstitusi diadakan, fungsi pemerintahan ditentukan, hingga berbagai pedoman teknis yang memandu arah dan tujuan dalam kegiatan tertentu. Dalam konteks ini fungsi Kemendikbud merangkul segenap peraturan yang lebih tinggi, menjabarkannya dalam peraturan kementerian dalam lingkungnya hingga mengawal berbagai program kelembagaan menjadi penting.

Selain memahami Pancasila sebagai bangunan gagasan dan dengan cara bagaimana bangunan gagasan tersebut dipahami, penting untuk memahami mengapa diperlukan seperangkat pedoman dan aturan yang mengiringi gagasan tersebut bisa diimplementasikan. Pancasila yang menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum



di Indonesia menjadi pedoman yang keseluruhan peraturannya mengambil jiwa Pancasila dan menjiwai segenap peraturan tersebut. Secara formal hal tersebut bagian dari mekanisme legal dan jiwa dari negara hukum yang mendorong negara untuk mengawal implementasi kebijakannya dengan bercermin dan menurunkan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Uraian panjang lebar tentang *raison d'être dan ratio legis* mengapa Pancasila mendapatkan kedudukan seperti itu telah disampaikan pada bagian awal tulisan ini.

Kemudian upaya penyemaian nilai-nilai Pancasila bersandar pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam lingkup sistem pendidikan nasional. Perpres tersebut memuat tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) peserta didik melalui olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga. PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, non formal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Sehingga menjadi jelas acuan penyemaian nilai-nilai

Pancasila dalam lingkup Kemendikbud Ristek bersandar pada pendidikan karakter.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 terdapat keterangan bahwa tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu "Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya". Adapun rumusan kompetensi sikap sosial, yaitu "Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air". Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Pancasila yang selaras dengan dunia anak sekolah dasar perlu dicarikan terobosan dan jalan keluarnya sebagai kegiatan penyemaian nilai-nilai. Baik melalui cara-cara keteladanan, pembiasaan, perumpamaan, kisah-kisah atau cerita anak-anak, jenis-jenis permainan, penguatan mental karakter, kedisiplinan hingga pemberian penghargaan. Bagaimana nilai-nilai abstrak Pancasila mampu diterjemahkan dalam bentuk yang konkret dan mudah dipahami oleh anak didik bahwa itulah Pancasila. Pendidikan dasar memberikan kesan dan menanamkan kedekatan yang kuat atas Pancasila. Hingga sepanjang hayatnya kemudian mereka akan membuktikan dalam lingkup yang lebih tinggi dan luas bahwa Pancasila itu tidak hanya dibutuhkan dalam lingkup negara, tetapi memandu mereka dalam memanggul sifat manusia Indonesia yang unggul. Hal ini telah menjadi komitmen Kemendikbud untuk mewujudkannya seperti tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

PANCASILA



Kombinasi gagasan dan segenap peraturan yang ada itu menjadi konsen bagian tulisan ini. Bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi manifestasi dalam profil pelajar Pancasila dengan tumbuhnya tunas-tunas Pancasila dalam sekolah dasar.

A

Manifestasi Sila Pancasila

Kekuatan gagasan Pancasila yang tercermin dalam sila-sila menjadi pedoman untuk memperkuat kepribadian bangsa Indonesia. Memahami sila demi sila Pancasila melalui penjelasan penalaran hingga muncul penghayatan rasa tidak terlepas dari upaya menerapkannya dalam dunia pendidikan dan kehidupan keseharian.

Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam untaian kalimat yang indah dan kokoh pada Pembukaan UUD 1945. Kita dapat meresapi dan menghayati secara lebih mendalam selengkapnya sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,



Sumber Foto: google.com

maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari sana kita dapat mulai memahami betapa sila-sila Pancasila menjadi sangat relevan dan menjadi manifestasi berbangsa dan bernegara seperti sekarang. Berikut adalah uraian makna sila-sila dalam Pancasila:

1



Ketuhanan Yang Maha Esa (YME).

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa pikiran manusia mampu memverifikasi sesuatu dengan tiga cara. Salah satunya adalah dengan cara verifikasi murni dengan pendekatan filosofis. Dalam hal ini, penggalian makna memang tidak secara langsung dapat ditemukan realitasnya dalam pikiran, meski begitu pemahaman kita didapat dari pengamatan kita terhadap realitas di luar.

Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan salah satu sila dari lima sila Pancasila yang sifatnya universal. Konsep ini disusun berdasarkan pada pengamatan yang tampak dalam realitas nyata dari sosio-kultur masyarakat Indonesia yang meyakini beragam aliran kepercayaan dan agama. Kepercayaan dan agama itu memiliki konsep tentang ketuhanannya masing-masing, yang dipahami dari kitab suci mereka menggambarkan Tuhan. Karena perbedaan pemahaman dan penggambaran Tuhan itulah kemudian konsep tentang Tuhan di masing-masing kepercayaan dan agama pun menjadi berbeda. Hal ini sejalan dengan ajaran Kitab Suci, bahwa setiap orang dilarang mengolok-olok keyakinan dan Tuhan dari masing-masing orang, sebab jika itu terjadi, maka akan timbul saling olok satu sama lain dan ujungnya adalah permusuhan yang berdarah-darah. Dunia telah mencatat sejarah paling kelam akibat hal seperti ini. Dan Pancasila adalah upaya untuk mencegah hal itu terjadi dalam konteks Indonesia yang beragam.

Sejak awal, para pendiri bangsa ini memahami betul hal tersebut. Bahwa pada dasarnya, fitrah manusia, apalagi manusia Indonesia, pada dasarnya bertuhan atau meyakini tentang adanya Realitas yang lebih absolut dari dirinya dan segala apa pun yang ada di alam semesta ini. Karena Realitas absolut itu sulit dan mustahil digambarkan, maka dalam realitas kehidupannya, banyak manusia

menggunakan perangkat atau sarana di alam ini sebagai penghubung dirinya untuk sampai padanya. Perangkat atau sarana itu kemudian menjadi sangat sakral sifatnya.

Pada realitas ontologisnya (dasar), wujud Tuhan itu satu, tunggal, tidak jamak dan berbilang. Ia adalah Realitas absolut yang ada di mana-mana dan tidak ke mana-mana. Meski demikian, epistemologi manusia kemudian memahaminya dengan gambaran yang berbeda-beda, dan pada akhirnya memunculkan beragam pandangan tentang Tuhan yang berbeda pula dari setiap pemeluk agamanya. Konsekuensi dari semua ini adalah bentuk wujud laku atau aksiologi/aktivitas peribadatnya menjadi berbeda satu sama lain. Karena itu, menjalankan secara konsisten dan teguh ajaran agama adalah bagian dari manifestasi Ketuhanan YME. Selain juga tentu dengan tidak mengolok-olok aktualisasi keagamaan orang lain yang berbeda dengan kita, bahkan menghormatinya adalah bagian dari manifestasi sila ketuhanan ini.

Realitas inilah yang kemudian mengilhami para pendiri bangsa kita bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah konsep paling dasar atau asali dari setiap agama, yang menggambarkan bahwa sesungguhnya setiap manusia beragama meyakini Realitas tunggal dan satu-satunya sebagai sumber dan tujuan hidup mereka. Karena itu, sifat religiusitas bangsa ini tidaklah dinafikan oleh pendiri bangsa, justru malah ditampung sebagai konsep universal pertama dalam sila Pancasila. Menafikan agama dan keyakinan religius bangsa ini sama saja menolak fitrah bangsa Indonesia. Yakni bangsa yang sejak awal berketuhanan. Keyakinan religius itulah yang mengilhami para pendiri bangsa kita untuk menempatkan dan menjadikan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai bagian dari sila utama Pancasila. Sebab mereka memahami, bahwa Tuhanlah sumber dan tujuan hidup manusia dan kita sebagai bangsa, caranya adalah dengan memperjuangkan nilai-nilai universal empat sila lainnya agar termanifestasikan dalam kehidupan kita di dunia ini.



Meski begitu, realitas ini masih belum dipahami sebagian orang dari bangsa ini. Sebagian orang menganggap bahwa Pancasila tidak sesuai dan relevan dengan nilai-nilai agama, bahkan menganggapnya bertentangan. Sebab agama lebih tinggi kedudukannya dari Pancasila, agama dari Tuhan dan Pancasila dari manusia. Persoalan ini, dari sejak Pancasila ini ditetapkan sebagai dasar negara sampai hari ini, masih menjadi polemik dan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Perdebatan yang banyak menguras energi anak bangsa secara sia-sia, bahkan tak sedikit harus mengorbankan darah dan nyawa. Dalam hal ini Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berpandangan, "Penghadapan Islam kepada Pancasila adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena menghadapkan sesuatu yang bersifat umum kepada pandangan yang bersifat khusus (2006 : 90).

Pernyataan Gus Dur di atas merupakan pernyataan yang bisa dilihat dari aspek keumuman dan kekhususan dua pandangan hidup tersebut. Pandangan hidup Pancasila dan pandangan hidup Islam. Pernyataan bahwa penghadapan Islam kepada Pancasila adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena yang satu umum dan yang lain khusus sifatnya adalah pernyataan logis yang berangkat dari pendalaman atas konsep empat relasi logika. Ini menunjukkan bahwa definisi Islam lebih umum sifatnya dibanding definisi Pancasila. Karena Islam adalah pandangan hidup ilahiyah yang ditujukan untuk seluruh umat manusia di dunia tanpa sekat agama, wilayah, dan subkultur lainnya, selain itu Islam juga membahas persoalan kenabian dan juga hari kebangkitan. Sementara Pancasila adalah pandangan hidup yang ditujukan terbatas untuk manusia Indonesia dalam wilayah dan kebudayaan khusus dengan kelima silanya, dan ia tidak membahas persoalan kenabian maupun hari kebangkitan. Namun, Islam juga bisa

menjadi khusus, jika dilihat dari aspek umat manusia yang memeluk Islam saja. Dengan demikian, dalam konteks ini, relasi logis dari pernyataan Gus Dur di atas adalah relasi antara Islam dan Pancasila adalah relasi dominasi. Artinya agama (Islam) mencakup ajaran Pancasila, tetapi Pancasila tidak mencakup seluruh ajaran agama. Meski demikian, ini tidak berarti relasi keduanya berbeda dan saling bertentangan.

Selain Gus Dur, banyak pemuka agama dan ulama lainnya yang mengatakan bahwa Pancasila tidak bertentangan sedikit pun dengan agama. Ungkapan tersebut disampaikan dengan bahasa sederhana dan langsung pada kesimpulan logisnya. Tidak dijelaskannya argumentasi logis dan filosofisnya, agar orang Indonesia mudah memahaminya. KH. Ahmad Shiddiq, misalnya, mengatakan bahwa Pancasila dan Islam itu sejalan bahkan saling menunjang. Keduanya bukan sesuatu yang bertentangan dan untuk dipertentangkan. Ia juga menggambarkan tentang tujuan bernegara dan Pancasila itu niscaya bagi bangsa Indonesia sebagai sarana untuk perjuangan mencapai kemakmuran dan keadilan sosial:

Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nation (bangsa), teristimewa kaum muslimin, untuk mendirikan negara (kesatuan) di wilayah Nusantara. Para Ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial (KH. Husein Muhammad, 2015).

Jelas bahwa kemakmuran dan keadilan sosial adalah ajaran universal yang diajarkan dalam agama, hal ini juga selaras dengan nilai dari Pancasila. Artinya, pada aspek ini, Pancasila dan agama memiliki irisan dan bahkan saling beriringan. Karena itu, Pancasila sebagai dasar negara bisa diterima oleh para ulama lainnya karena ditinjau dari aspek khususnya. Yakni kekhususan sebagai bangsa Indonesia yang plural. Sementara agama diterima sebagai sebuah keyakinan ilahiyah ditinjau dari aspek keumumannya, yakni pandangan hidup ilahiyah untuk seluruh umat manusia tanpa melihat aspek kebudayaan, sosio-politik, dan geografisnya. Dari sini jelaslah, baik Pancasila maupun agama memang memiliki domain yang berbeda, tetapi kemudian bertemu pada beberapa aspek kesamaannya. Dengan tegas dan yakin kita bisa katakan bahwa Pancasila tidaklah bertentangan sama sekali dengan agama, bahkan untuk mempertentangkannya pun menjadi mustahil.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

2 Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kenapa harus kemanusiaan yang adil dan beradab? Kenapa bukan manusia yang adil dan beradab? Kenapa pendiri bangsa memilih yang pertama dan bukan yang kedua sebagai proposisi sila kedua Pancasila? Bukankah itu sama saja. Bahkan, terkesan pemborosan kata-kata saja.

Untuk menjawab hal tersebut, kita tidak bisa hanya bisa menduga-duga, apalagi berasumsi tanpa dasar pikiran yang logis dan argumentatif. Perlu dipahami bahwa pemilihan diksi “kemanusiaan” dan tidak

dipilihnya kata “manusia” oleh para pendiri bangsa bukanlah sekadar perbuatan iseng-iseng semata. Namun, pemilihan diksi tersebut merupakan proses yang begitu serius, sungguh-sungguh, dan sangat filosofis untuk menemukan makna dari setiap diksi yang akan digunakan dalam proposisi Pancasila. Dan proposisi-proposisi itulah yang akan menjadi dasar negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan setiap diksi Pancasila tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, melainkan proses yang meniscayakan setiap pemikir dan pelakunya berupaya memberikan sumbangan pemikiran yang paling radikal dan paling mendalam untuk menghadirkan makna yang sesungguhnya ke dalam Pancasila.

Di sisi lain, dalam Filsafat kita mengenal apa yang



kita sebut sebagai substansi (sejati) dan aksiden (bukan sejati). Substansi adalah sesuatu yang merupakan dasar, hakikat, dan inti dari sesuatu. Substansi inilah yang nantinya membuat kita bisa membedakan sesuatu satu dengan sesuatu yang lain. Adapun aksiden adalah gambaran, permukaan, atau sesuatu yang bukan kesejatian dari sesuatu tersebut. Misalnya, istilah “kekursian” dan “kursi”. Dua istilah ini tentu berbeda. Kekursian adalah kata yang menunjuk pada kemendasaran atau kesejatian dari kursi. Kekursian adalah sesuatu yang paling inti dari konsep kursi, karenanya seseorang bisa mengenali setiap kursi bagaimanapun perbedaan rupa, bentuk, dan bahannya. Kekursian yang terdapat dalam kursi itulah yang membuat akal kita bisa mengenali setiap kursi yang berbeda-beda di kehidupan kita.

Sementara itu, kursi adalah kata yang bisa kita perlakukan secara universal dan partikular. Jika kita mengatakan “kursi” tanpa membatasinya dengan predikat apa pun, maka dia menjadi konsep universal, sebab konsep kursi seperti itu bisa kita terapkan pada jenis-jenis kursi yang ada seperti kursi sekolah, kursi kantor, kursi pijat, dsb., betapa pun kursi itu berbeda jenisnya. Sedangkan jika kita mengatakan “kursi sekolah”, maka kita telah menjadikan kata kursi menjadi partikular sifatnya. Alasannya karena kita telah mempredikasikan sekolah kepada kursi. Memberikan predikat pada subjek berarti membatasi subjek. Membatasi subjek dengan predikat berarti menyempitkan makna dari subjek tersebut. Pernyataan seperti “kursi sekolah” sama saja dengan ingin mengatakan “kursi yang itu saja bukan kursi yang lain”. Dengan demikian, karena makna subjek menjadi terbatas, maka kursi dalam konteks ini partikular sifatnya. Sekali lagi, alasannya kursi “kursi sekolah” (hanya) menunjukkan bahwa kursi yang dimaksud bukanlah keseluruhan jenis kursi, melainkan sebagian atau satu jenis kursi saja, kursi sekolah.

Meski demikian, baik kursi dalam konteks universal maupun partikular, hanya menunjukkan penampakan atau gambaran dari kursi saja, tetapi bukan substansi dari kursi itu sendiri. Meski banyak orang mungkin bisa mengenali jenis kursi, tetapi belum tentu orang tersebut bisa memahami apa kekursian itu (apa yang sejati dari kursi itu?). Di sinilah kita memahami bahwa para pendiri bangsa ini sangat luar biasa hebat dan jeli.

Menggunakan diksi kemanusiaan dan bukan diksi manusia menunjukkan bahwa para pendiri bangsa ingin agar setiap warga bangsa bisa dan mampu mengenali hakikat atau sesuatu yang sejati dari dirinya (manusia), bukan hanya mampu mengenali manusia dalam rupa, bentuk, dan jenisnya semata.

Lalu apa hakikat atau substansi manusia itu?

Para pendiri bangsa kita tidak hanya jeli dan hebat, melainkan juga arif. Selain menempatkan diksi kemanusiaan dalam teks Pancasila sebagai upaya menemukan kesejatian manusia, mereka juga meninggalkan tanda, bahwa yang sejati dari kemanusiaan adalah adil dan beradab. Adil sendiri adalah sebuah konsep yang tidak kita temukan di realitas luar kehidupan kita. Kita tidak bisa menemukan adil sebagaimana manusia yang bisa kita lihat bentuknya, rupanya, dan aktivitasnya. Meski adil tidak memiliki bentuk atau realitas di luar kehidupan kita, tetapi kita bisa mengenalinya melalui abstraksi atau pengamatan kita terhadap aktivitas yang menunjukkan adil itu sendiri. Misalnya, seorang koruptor dituntut jaksa 15 tahun penjara atas perbuatannya, dan hakim pun memutuskan demikian. Sikap jaksa dan hakim inilah yang kita sebut adil. Kita bisa menyebut adil perbuatan jaksa dan hakim tersebut, karena kita mengamati perbuatan jaksa dan hakim tersebut sebagai sesuatu yang adil, meskipun perbuatan jaksa dan hakim bukanlah wujud adil itu sendiri.

Oleh karena itu, adil bukanlah benda yang berwujud sebagaimana kita dan benda lainnya. Namun, adil adalah benda abstrak yang baru dapat kita pahami ketika terimplementasi dalam wujud laku manusia. Dengan demikian, kemanusiaan yang adil adalah kemanusiaan yang mampu memperlakukan manusia tanpa pernah melihat atribut-atribut yang terpasang di diri manusia mana pun. Si kaya tidak menghina si miskin karena hartanya, penguasa tidak menindas rakyat karena kekuatannya, si putih tidak menghina si hitam karena kulitnya, dan sebagainya. Namun, kemanusiaan yang adil itu adalah kemanusiaan yang memperlakukan manusia setara secara proporsional berdasarkan prestasi dan kontribusi yang ia lakukan di kehidupan sosial. Kemanusiaan yang adil adalah kemanusiaan yang mengapresiasi manusia dengan adil, bukan menghina, mengolok-olok, apalagi menindas mereka atas nama logika kuat-lemah.

Sementara itu, diksi beradab juga digunakan sebagai basis kemanusiaan dalam Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, beradab merupakan kata kerja dari adab yang bermakna mempunyai adab; mempunyai budi bahasa yang baik; berlaku sopan dan telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya. Adapun kata dasarnya, adab dimaknai sebagai kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak. Dari kata adab pula muncul kata peradaban. Peradaban sendiri dimaknai sebagai kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin dan hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Dari penjelasan KBBI tersebut, kita menemukan kata kunci bahwa beradab berasal dari adab yang bisa menjadi peradaban. Kata kuncinya jelas yakni kecerdasan lahir batin yang menimbulkan kehalusan akhlak atau budi pekerti. Menjadi jelaslah bahwa kemanusiaan yang beradab itu adalah kemanusiaan yang, baik akal maupun hati, tercerahkan. Dari akal dan hati yang tercerahkan itulah seseorang bisa menghasilkan kehalusan aksiologi atau akhlak yang sopan, santun, dan tulus kepada yang lain berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar.

Kemanusiaan yang beradab adalah kemanusiaan yang mengajak setiap individu manusia untuk merenungi secara sungguh-sungguh dan mendalam tentang hakikat dirinya sebagai individu maupun dirinya sebagai bangsa dan warga dunia. Oleh sebab itu, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah hakikat dari wajah bangsa Indonesia. Itulah yang terus menerus kita renungkan dan kita upayakan untuk diamalkan.

Di sisi lain, adab/beradab/peradaban tidak hanya mengandung makna kecerdasan lahir (akal), tetapi ia juga mengandung makna kecerdasan batin/ jiwa (hati). Oleh karena itu, kemanusiaan yang beradab tidak semata-mata hanya untuk menghadirkan ilmu pengetahuan dan peradaban semata, dalam pengertian kemajuan pengetahuan, teknologi, dan gaya hidup modern. Namun, kemanusiaan yang beradab memiliki makna bahwa kemajuan dan peradaban, yang dihasilkan dari hasil kecerdasan akal lalu menghasilkan ilmu pengetahuan, haruslah

diisi dan dituntun oleh kecerdasan batin yang luhur. Di dalam ilmu pengetahuan yang maju, teknologi yang unggul, dan kehidupan manusia yang modern juga harus turut hadir di tengah-tengahnya sikap cinta, kasih sayang, gotong royong, tenggang rasa, dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kenapa kemanusiaan yang adil beradab pada sila kedua sangat terkait erat dengan sila pertama, sila ketuhanan. Hal ini tidak lain karena sifat-sifat luhur jiwa merupakan pengejawantahan atau manifestasi dari sifat-sifat mulia Tuhan.

Dengan demikian, konsep kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa kita bukanlah konsep kemanusiaan yang terpisah dengan Tuhan (sekuler). Melainkan konsep kemanusiaan yang selalu terhubung dengan konsep ketuhanan di sila atasnya. Kemanusiaan yang dipraktikkan tanpa ada ruh ketuhanan akan menjadi dan tampak semu. Hal tersebut merupakan kontradiksi atas fitrah dan naluri bertuhan manusia, terlebih bangsa Indonesia. Melalui kesadaran akan Tuhan, kemanusiaan akan sampai pada hulu keadilan dan peradaban yang hakiki. Dari Tuhanlah kita bermula, dan kita akan kembali ke Tuhan.

Di sisi lain, manusia memang pada dasarnya selalu berusaha menuju kesempurnaan, baik lahir maupun batinnya. Karena Tuhan adalah Kesempurnaan itu sendiri, maka perjalanan manusia akan senantiasa mengarah ke sana. Tuhanlah Keadilan dan Peradaban/Ilmu itu sendiri. Dan hal itulah juga yang dimaksud dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kemanusiaan kita senantiasa harus dituntun kepada cahaya ketuhanan, yakni kesempurnaan yang berdasarkan ilmu dan kasih sayang Tuhan. Inilah yang membedakan konsep kemanusiaan Indonesia dalam Pancasila dengan konsep kemanusiaan yang lainnya. Pada prinsipnya, mustahil bertuhan tanpa berkemanusiaan, dan mustahil berkemanusiaan tanpa bertuhan. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Mohammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab yang niscaya terhubung dengan sila Ketuhanan YME.



Sumber Foto: google.com

Mohammad Hatta berkata:

“Apabila sifat-sifat ini hidup dalam jiwa manusia, berkat didikan dan asuhan, maka dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sendirinya terlaksana dalam pergaulan hidup. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti disebut tadi, tak lain dari kelanjutan perbuatan dalam praktek hidup daripada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa” (Mohammad Hatta, : 41).

Oleh karena itu, dengan pikiran yang sehat dan hati yang jujur, kita menyadari bahwa mustahil konsep seperti Pancasila bisa dirumuskan kecuali oleh orang-orang yang sudah tercerahkan lahir dan batinnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Merekalah orang terpilih yang hati dan pikirannya senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan. Dan kita



Sumber Foto: google.com

Sementara itu Ki Hajar Dewantara juga berkata:

“... Kemanusiaan dan Ketuhanan, juga keduanya benar-benar saling berhubungan sangat erat. Perkataan kemanusiaan mengandung arti keluhuran serta kehalusan, yang tampak di dalam hidup manusia, baik juga bersifat batin maupun lahir. Bila dibanding dengan hidup hewani...” (Ki Hajar Dewantara, : 16).

bersyukur bahwa para pendiri bangsa kita adalah orang-orang arif lagi tercerahkan itu. Bahkan, mereka dengan sukarela kemudian mewariskan sesuatu yang lebih berharga dari emas dan permata apa pun bagi bangsa Indonesia. Sebuah dasar negara bernama Pancasila sekaligus merupakan pencerahan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.



Persatuan Indonesia

Setelah berhasil memanfaatkan situasi geopolitik dunia pasca Perang Dunia II, bangsa Indonesia berhasil memproklamkan dirinya pada 17 Agustus 1945 sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Ini artinya, bangsa Indonesia secara tegas menyatakan dirinya bahwa mereka setara dengan bangsa dan negara lain di dunia. Dan secara de facto Indonesia benar-benar terlahir sebagai sebuah bangsa dan negara baru sehari setelahnya, 18 Agustus 1945. Setelah berhasil menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada dua tanggal penting itulah Indonesia berhasil secara politik untuk memindahkan kekuasaan dari penjajah ke bangsa Indonesia dan mampu mempersatukan wilayahnya yang luas serta terpencar di bawah agenda persatuan Indonesia.

Namun, agenda persatuan Indonesia bukan hanya agenda untuk menyatukan wilayah agar tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saja. Akan tetapi ia juga merupakan agenda untuk menyatukan secara batin setiap elemen bangsa yang secara realitas berbeda satu sama lain. Kenyataan ini haruslah dipahami betul dan hati-hati. Bahwa agenda persatuan Indonesia tidak hanya terletak pada aspek politik saja, tetapi juga terkait erat dengan agenda penyatuan sosio-kultur bangsa Indonesia yang kompleks dan beragam. Oleh karena itu, ketika agenda pemindahan kekuasaan telah terlaksana dan penjagaan wilayah NKRI terus dilaksanakan sampai hari ini, maka kerja selanjutnya adalah upaya untuk mewujudkan persatuan batin tersebut. Penyatuan batin ini menjadi niscaya adanya, sebab tanpa itu perpecahan akan senantiasa menghantui bangsa kita. Kohesi batin itu harus dibangun dan diupayakan secara jujur dan sungguh-sungguh oleh setiap anak bangsa. Mereka harus memiliki hati yang lapang dan prasangka baik untuk mau memahami, mengerti, mencintai, dan memiliki satu dengan yang lain. Tanpa adanya kohesi batin yang jujur dan sungguh-sungguh ini, maka persatuan wilayah secara politik hanyalah kepura-puraan/kepalsuan yang suatu saat akan timbul ke permukaan, dan dia menjadi pemicu bagi



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

terjadinya konflik yang bermuara pada perpecahan. Sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi pihak luar selalu menginginkannya.

Sejarah telah mengingatkan banyak hal kepada kita. Akibat kelalaian dan keengganan membangun kohesi batin secara jujur dan tulus sesama anak bangsa, kohesi sosial kita lemah. Kita pernah mengalami konflik-konflik horizontal antar sesama anak bangsa yang bahkan harus mengorbankan darah dan nyawa dengan sia-sia. Tidak hanya itu, upaya-upaya disintegrasi oleh sebagian kelompok, sayup-sayup terus terdengar sampai hari ini. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau DI/TII adalah beberapa contohnya. Keengganan dan ketidakjujuran membangun kohesi batin sesama anak bangsa hanya akan memperuncing keragaman dan perbedaan bangsa kita. Jika kita tidak juga mau belajar dari sejarah, lambat laun kita akan tiba pada persoalan seperti konflik masa lalu yang sia-sia dan mahal harganya.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa persatuan Indonesia itu bermakna persatuan lahir dan batin. Persatuan politik dan sosial, kebudayaan, serta kemanusiaan. Kita telah berupaya sekuat tenaga menjaga persatuan wilayah melalui kekuatan politik yang kita miliki, sehingga sampai hari ini



wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote masih tetap utuh kokoh berdiri. Namun, sekali lagi itu tidak cukup, kita perlu persatuan batin sesama anak bangsa. Di mana setiap orang dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan karakter yang berbeda harus merasa satu dengan yang lain adalah satu. Sehingga, ketika yang lain sakit, maka sakit seluruhnya. Sebaliknya, jika yang lain bahagia, maka bahagia seluruhnya. Hanya dengan itu, kita bisa memahami, mencintai, memiliki, dan perhatian satu sama lain tanpa mudah mencurigai hanya karena berbeda. Hanya dengan persatuan model inilah kita akan maju, kita akan besar, dan kita akan menjadi bangsa yang luhur lagi beradab.

Agenda pergerakan Nasional seperti inilah yang dicita-citakan para leluhur kita. Mereka tidak hanya ingin mendirikan sebuah negara merdeka dengan mempersatukan bekas wilayah jajahan penjajah, tetapi juga menginginkan adanya kohesi batin antar sesama anak bangsa untuk bisa hidup saling berdampingan dan gotong royong secara ikhlas dan jujur untuk mewujudkan cita-cita bangsa bersama. Yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semua itu bisa tercapai jika kita merasa secara lahir batin adalah Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*. Dengan demikian, Persatuan Indonesia adalah persatuan yang didasari pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Terkait persatuan Indonesia ini. Mohammad Hatta memberikan penjelasannya yang indah dan luar biasa menggugah. Ia berkata:

*“Dengan hidupnya sifat-sifat tersebut dalam jiwa manusia Indonesia, Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah. Persatuan Indonesia itu diperkuat pula oleh lambang negara kita, *Bhinneka Tunggal Ika*, bersatu dalam berbagai ragam. Besarnya daerah kita menimbulkan dalam sejarah bahwa*

tiap-tiap daerah atau suku bangsa mempunyai corak masing-masing, tetapi keseluruhannya merupakan satu kesatuan, yang dilindungi sekeliling oleh dua segara, Segara Indonesia dan Segara Pasifik dan diapit pula oleh dua benua Asia dan Australia. Dalam kedudukannya semacam itu hanya bersatu kepulauan Indonesia bisa teguh, terpecah bisa jatuh. Sebab itu persatuan Indonesia menjadi syarat hidup bagi Indonesia (Mohammad Hatta, : 44).

Sementara itu, Ki Hajar Dewantara memberikan penjelasan yang tak kalah pentingnya, bahwa persatuan Indonesia adalah fitrah batin manusia yang senantiasa tumbuh dan kuat di jiwa mereka atas tanah kelahirannya. Rasa kebangsaan itulah yang membuat seseorang melenyapkan ego personal dan kelompoknya, lalu menggantinya dengan ruh kebangsaan yang lebih besar yakni persatuan batin setiap anak bangsa, bahwa saya adalah dia, dia adalah saya, bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara berkata:

“Dalam soal alam-alam kejiwaan manusia ini (mulai alam diri sampai alam kemanusiaan) ada satu alam, satu lingkaran yang biasanya sangat mempengaruhi pikiran serta perasaan manusia (lebih dari pada lain-lainnya) yaitu alam kebangsaan... faktor lain yang juga menyebabkan rasa kebangsaan itu berpengaruh besar kepada jiwa manusia ialah karena rasa kebangsaan itu merupakan lipat gandanya rasa diri dari orang-orang yang bersamaan nasib, jadi menurut ajaran massa psikologi bersifat sangat kuat dan sangat keras, hingga dapat melenyapkan rasa diri perorangan...” (Ki Hajar Dewantara, : 25-26)

4



Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sebagaimana diksi kemanusiaan dan manusia, diksi kerakyatan mengacu kepada kemendasaran atau keaslian dari rakyat. Sehingga kata kerakyatan dalam sila keempat ini menunjuk realitas di dalam diri rakyat itu sendiri. Rakyat sendiri adalah sebuah atribut yang tidak memiliki wujudnya pada realitas luar/dunia. Namun, atribut rakyat itu kita tujukan pada sekumpulan orang atau individu manusia yang hidup dalam satu negara dan bangsa. Manusia-manusia yang hidup dalam sebuah bangsa dan negara itulah yang kita maksud rakyat. Mereka hidup bersama individu lainnya, tunduk dalam aturan dan pemerintahan yang sah, dan mereka merupakan penduduk di dalam suatu negara. Dengan demikian, meski rakyat pada dirinya tidak memiliki realitas wujudnya, tetapi kita bisa memiliki pengetahuan tentang rakyat dalam realitas wujud ketika konsep rakyat kita predikatkan pada manusia-manusia di suatu bangsa.

Oleh karena itu, kita memahami bahwa makna kerakyatan di sini adalah sesuatu yang paling mendasar, asli, dan mendalam yang terdapat dalam diri dan jiwa rakyat atau manusia Indonesia. Apa sesuatu yang mendasar, asli, dan mendalam dalam jiwa rakyat itu? Jawabannya tidak lain adalah yang ber-Ketuhanan Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan memiliki komitmen yang luhur serta kukuh di dalam hatinya kepada persatuan Indonesia yang aktualitasnya tertuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan inilah yang pada akhirnya kita maknai sebagai ruh bangsa.

Meski demikian, konsep kerakyatan itu tidak hanya berhenti pada upaya menemukan kesejatiannya diri sebagai bangsa, akan tetapi kesejatiannya tersebut juga harus dipimpin dan dituntun oleh sebuah pengetahuan sejati yang senantiasa tunduk pada kebijaksanaan. Pengetahuan sejati itu kita sebut sebagai hikmah. Hikmah sendiri tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan atau ilmu semata.

Namun, ilmu itu juga memberikan dampak positif pada setiap orang, baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu hikmah bukanlah *science* (ilmu), bukan juga *knowledge* (pengetahuan) yang tumpuannya pada akal dan aspek kognitif semata. Dalam Filsafat, hikmah sering disebut sebagai *Philosophia*, yakni pengetahuan tertinggi tentang kebijaksanaan.

Pencarian hikmah ini sendiri sejatinya adalah fitrah manusia yang telah dimulai sejak manusia pertama, Nabi Adam. Mereka mencari pengetahuan tertinggi yang di dalamnya mengandung berbagai macam kebijaksanaan untuk diamalkan dalam hidup. Hikmah ini adalah ilmu yang hanya bisa dimiliki oleh yang akal pikiran dan hatinya siap menerimanya. Hati dan pikirannya harus bersih dari segala macam kesesatan dan keburukan-keburukan lainnya yang menyebabkan hikmah itu tidak datang ke dalam dirinya. Hikmah itu datang dari Tuhan dan diberikan kepada mereka yang layak untuk dipercaya menerimanya. Karena Tuhan adalah Zat Yang Maha Suci, maka mustahil mereka yang jiwanya kotor akan mampu menerima hikmah tersebut. Kecuali mereka yang selalu berusaha untuk memperbaiki dan mengupgrade dirinya untuk menjadi sempurna dari hari ke hari.

Socrates, filsuf Yunani, pada masanya menyebut dirinya sebagai filosof, yang bermakna orang yang mencintai kebijaksanaan. Pernyataan ini ia ungkapkan sebagai kritik atas banyaknya sarjana-sarjana dan intelektual-intelektual pada masanya yang menyebut diri mereka sebagai kebijaksanaan itu sendiri, atau orang bijak. Padahal mereka menjual pengetahuan dan membolak-balikkan argumen untuk mengebiri hukum dan keadilan demi kedudukan dan harta.

Maka tidak heran bila banyak orang berpendidikan yang memiliki *science* (ilmu) dan *knowledge* (pengetahuan) tinggi, tetapi pada saat yang sama perilaku buruknya juga tinggi. Seperti tinggi korupsinya, tinggi kolusinya, dan tinggi nepotismenya. Jawabannya jelas, ilmu dan pengetahuan mereka hanya sampai pada rasional kognitif saja, tetapi tidak menyentuh batin dan jiwanya. Oleh sebab itu, mereka yang memiliki hikmah tentu berbeda dengan mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Mereka yang memiliki hikmah sudah pasti sejalan antara pikiran dan tindakannya.



Sangat sulit, bahkan mustahil, mereka bertindak menyimpang dari jalan-jalan kebijaksanaan. Sebab ilmu mereka adalah cahaya yang berasal Tuhan, dan Tuhanlah yang membimbing mereka dengan cahaya hikmah-Nya. Inilah ilmu para rasul, para nabi, dan orang-orang suci dari setiap agama dan peradaban.

Kerakyatan yang dituntun akal dan hati inilah yang diinginkan oleh Pancasila. Suatu kesejatian di mana peradaban dapat dibentuk oleh ilmu pengetahuan melalui spekulasi akal, tetapi pada saat yang sama ruhnya hidup untuk mampu merasa. Sehingga peradaban terbentuk menjadi lembut dan tidak kering. Akalnya memacu penemuan, hatinya memacu kebijaksanaan. Dengan demikian, kemajuan pengetahuan akan selalu selaras dengan kemanusiaan. Kemajuan itulah yang menjadi sarana untuk membawa manusia kepada kesempurnaan dirinya sebagai individu manusia dan bangsa. Di sini kita memahami bahwa terdapat Filsafat Pendidikan Pancasila yang tersembunyi dan begitu dalam maknanya di dalam Pancasila. Bahwa Filsafat Pendidikan Pancasila tidak hanya bertumpu pada akal semata untuk mewujudkan peradaban, tetapi juga bertumpu pada hati untuk mewujudkan kebijaksanaan di dalam peradaban tersebut. Ini artinya, Filsafat Pendidikan Pancasila menekankan aspek ilmu untuk amal, dan amal itu adalah kebaikan-kebaikan yang mawujud yang dapat dinikmati manusia dan semesta. Kebaikan inilah yang bisa kita sebut sebagai kebijaksanaan.

Oleh sebab itu, pendidikan kita harus bertumpu pada dua aspek tersebut. Inilah yang membedakan Filsafat Pendidikan Pancasila dengan konsep pendidikan lainnya, termasuk pendidikan luar. Dengan ini, kita sesungguhnya memahami bahwa aspek pendidikan yang hanya bertumpu pada aspek kognitif semata, ia akan kering. Sebaliknya, aspek pendidikan yang bertumpu pada aspek batin saja, ia akan becek. Susah berdiri, apalagi berjalan. Filsafat Pendidikan Pancasila adalah membangun peradaban duniawi yang dijiwai aspek ketuhanan. Ini berarti, membangun pikiran berarti membangun moralitas dan mentalitas yang benar dengan menumbuhkan rasa dengan menyucikan batin serta jiwanya. Dalam arti singkat, baik pikir (intelektual), zikir (ibadah), dan amal sholeh (amal baik) harus senantiasa selaras dan bergandengan. Sebagai sebuah dasar negara yang digali dari rahim bangsa, Pancasila dalam

membangun Filsafat Pendidikannya juga bertumpu pada realitas masyarakatnya. Maka tidak heran bila banyak lembaga pendidikan informal telah hidup di tengah-tengah masyarakat kita sebelum kemerdekaan terjadi. Lembaga-lembaga informal tersebut selain menekankan aspek kognitif, mereka juga menekankan aspek moral yang berasal dari agama, keyakinan, adat istiadat, dan kearifan lokal yang ada. Lembaga itu seperti pesantren, surau, sanggar, dan sebagainya. Hal yang tidak kita temukan dibanyak konsepsi pendidikan luar.

Setelah kita memahami kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan, kita harus melanjutkan bacaannya ke "dalam permusyawaratan/perwakilan". Artinya, meskipun kita memiliki pengetahuan (hikmah) yang benar, dan kita yakin bahwa ideologi dan perspektif kitalah yang benar, tetapi kebenaran itu tidak boleh dan bisa kita paksa kepada siapa pun, kecuali dalam rangka permusyawaratan. Kita hanya boleh mempropagandakan ideologi dan perspektif kita itu melalui dialog dan diskusi yang jujur, terbuka, tenggang rasa, dan saling menghormati satu sama lain serta memiliki komitmen untuk mencari kebenaran. Hanya dengan itu kita bisa hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda. Itulah yang kita sebut sebagai musyawarah untuk mufakat yakni dialog untuk mencari kebenaran dengan jujur. Dalam konteks inilah anak-anak didik harus dituntun. Meski mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni, tetapi mereka juga harus senantiasa diajarkan untuk mau mendengar yang lain, betapa pun orang lain itu mungkin salah dan keliru. Dengan demikian, anak-anak didik akan memahami dan menginsyafi makna musyawarah untuk mufakat itu. Inilah perangkat yang ideal untuk menciptakan generasi yang tangguh secara intelektual, besar secara hati, dan peka terhadap realitas bangsanya.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

Inilah yang dicontohkan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila, meski mereka memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda tentang Pancasila, tetapi mereka mampu duduk bersama, berdebat, dan berdialog dalam upaya menemukan kebenaran dan keidealan Pancasila untuk bangsa dan negara. Dan itulah yang kita warisi hari ini. Jika sejak pendidikan dasar, Filsafat Pendidikan Pancasila ini tertanam dalam diri anak didik, kelak tunas ini akan tumbuh menjadi pohon Pancasila yang kokoh secara intelektual, moral, dan sikap baik dari sisi sosial, politik, agama, dan budayanya.

Mohammad Hatta memberikan penjelasan yang cukup lugas dan tegas mengenai makna sila keempat ini dengan merelasikannya dengan sila lainnya. Mohammad Hatta berkata:

“Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah pengaruh dasar Ketuhanan yang Maha Esa serta dasar kemanusiaan yang adil beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Dasar Ketuhanan yang Maha Esa yang diamalkan seperti tersebut tadi, akan memelihara kerakyatan kita dari bujukan korupsi dan gangguan anarki. Korupsi dan anarki kedua-duanya bahaya yang senantiasa mengancam demokrasi, seperti ternyata dalam sejarah segalan masa (Mohammad Hatta, : 45).



Sementara itu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan makna kemasyarakatan kita dengan pendekatan Filsafat Pendidikan Pancasila di mana adat istiadat adalah salah satu sumber hukum atau ilham dalam membangun watak manusia Indonesia. Membangun watak itu hanya mungkin dilakukan dalam sebuah pendidikan. Ki Hajar Dewantara berkata:

“Dalam hidup kemasyarakatan dan kebudayaan bangsa kita tentang soal ini ada adat istiadat yang boleh dianggap petunjuk yang berharga dan patut kita perhatikan. Sebutan kata sepekat misalnya berarti harus adanya kemufakatan yang penuh, yang menurut adat istiadat tersebut (juga misalnya di Minangkabau masih dijunjung tinggi) dianggap syarat mutlak untuk memelihara keadilan sosial dan kesatuan yang utuh...” (Ki Hajar Dewantara, : 31).



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah kita memahami konsep kerakyatan dalam bingkai hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan. Kita akhirnya tiba pada muara dari tujuan berbangsa dan bernegara, yakni mencapai kebahagiaan hidup bersama. Kita menerima dan menggapai anugerah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut tanpa kecuali. Kata “tanpa kecuali” bermakna keadilan yang diberikan tanpa melihat suku, agama, dan budaya tertentu. Semua diperlakukan sama dan setara secara proporsional sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga bangsa.

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa keadilan sosial, selain berfungsi sebagai dasar negara, juga merupakan tujuan berbangsa dan bernegara yang harus diamalkan. Mohammad Hatta berkata:

“Keadilan sosial tidak saja menjadi dasar negara Republik Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan, supaya tercapai apa yang disebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keadilan sosial adalah langkah menentukan untuk melaksanakan Indonesia adil dan makmur” (Mohammad Hatta, : 46).

Sementara itu, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sila kedua sebelumnya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memahami bahwa konsep adil memanglah tidak memiliki wujud dalam rupa dan bentuk apa pun di realitas. Meski begitu, konsep adil bukanlah konsepsi abstrak yang hanya berhenti di kepala, melainkan dia memiliki realitasnya ketika dihubungkan dengan aktivitas manusia. Konsep ini sama seperti konsep sebab akibat di mana wujud realitas sebab akibat tidak akan kita temukan bentuknya sebagaimana benda lain seperti kopi, nasi, kasur, dsb. Hal yang seperti ini dalam filsafat disebut sebagai konsep sekunder filsafat. Meski secara realitas dia tidak memiliki wujud tunggal, tetapi pengetahuan kita akan jelas terhadapnya ketika aktivitas sebab akibat itu tampak. Misalnya, air mendidih karena dipanaskan api yang panasnya 100 derajat. Kita langsung paham bahwa sebab mendidih air karena dipanaskan oleh api yang panasnya 100 derajat. Sebabnya adalah api yang panas, dan akibatnya adalah air mendidih. Hal ini sama dengan konsep adil di mana adil baru akan muncul ketika perilaku adil diwujudkan. Ini telah kami jelaskan di bagian sila kedua sebelumnya.

Sementara itu, diksi keadilan selalu merujuk pada pencarian tentang kesejatian, keadilan, dan kemendasaran adil tersebut. Banyak sekali definisi tentang adil, dan seringkali banyak orang memperlakukan konsep adil secara serampangan tanpa memperdalam pengetahuannya tentang hal tersebut. Misalnya, melalui pencarian dan pendalaman secara hati-hati dan serius terhadapnya. Jika kita lihat dalam konteks Pancasila, maka kesejatian keadilan dalam Pancasila itu kemudian dibatasi dalam konteks sosial, yakni keadilan bersama untuk semua rakyat Indonesia. Terkait hal ini, Ki Hajar Dewantara juga memberikan catatan khusus kepada banyak orang tentang demokrasi modern/Barat dan keadilan. Banyak orang keliru memaknai demokrasi Barat dengan menganggap bahwa demokrasi tersebut niscaya mengandung keadilan karena telah mengkampanyekan slogan kesamaan. Padahal di di dalamnya kita temukan kekosongan akan harga dan nilai manusia lahir batin. Hal seperti ini menurutnya bukanlah keadilan. Ki Hajar Dewantara berkata:



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



“... mungkin orang mengemukakan bahwa demokrasi itu seharusnya telah mengandung maksud keadilan, akan tetapi selama demokrasi yang biasa disebut demokrasi secara Barat atau demokrasi modern masih paling mementingkan “kesamaan” misalnya kesamaan hak dalam segala hal serta biasanya mengabaikan harga dan nilai benda lahir atau batin, maka dengan sendiri demokrasi itu kerap kali tidak merupakan keadilan sosial. Hal itulah tentunya yang menjadi alasan bagi si pencipta Pancasila untuk memasukkan keadilan sosial disamping kedaulatan rakyat...”
(Ki Hajar Dewantara, : 30).

Keadilan baru akan terwujud bila aktivitas pemimpin dan rakyatnya telah menuju dan menampilkan keadilan, baik dalam perilaku maupun sikap, dalam mengelola diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, untuk mewujudkan keadilan bersama, kita harus tunduk dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam wajah kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena Tuhanlah Yang Maha Adil dan Dialah Keadilan itu sendiri. Maka keadilan menjadi niscaya adanya. Dia harus terus-menerus hadir di tengah-tengah hidup masyarakat bangsa. Kesadaran total atas Tuhan itulah yang membimbing kita untuk tidak berlaku zalim kepada sesama dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, keadilan bersama baru akan terwujud, jika kita memahami seluruh makna yang hidup dan terkandung di dalamnya. Pancasila boleh lama dan zaman boleh berkembang, tetapi Pancasila akan selalu hidup sampai kiamat bila pemilik setiap zaman bangsa ini mampu merealisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan bangsa.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

B

Profil Pelajar Pancasila

Setelah uraian ide dasar atas Pancasila sejak penggaliannya, landasan logika yang terbangun hingga pemaknaan yang dituangkan dalam uraian sila demi sila, maka upaya menyemai nilai-nilai yang diinginkan melalui dunia pendidikan masuka pada ranah kebijakan. Dimensi kebijakan pada dasarnya turunan konseptual dari gagasan besar yang ditanamkan dalam tujuan-tujuan programatik. Hal ini juga bagian utama dari mandat dan tujuan negara ini dibangun yang sangat tegas yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Alur berpikir dari cerapan realitas atas pancasila menuntun ragam strategi menuju capaian yang diinginkan. Kemendikbud menjadi bagian dari alat negara yang dituntun Pancasila (*leitstar*) dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut.

Mengaitkan kekuatan ide Pancasila dengan pembangunan karakter bangsa menghasilkan kehendak negara dan pemerintah untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cakap dan mumpuni menghadapi perubahan jaman. Profil Pelajar Pancasila merupakan manifestasi kehendak tersebut dan ditanamkan dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Profil Pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, pemikiran bapak pendidikan dan rujukan-rujukan kontemporer untuk mengantisipasi berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Sehingga Profil Pelajar Pancasila memiliki basis argumentasi yang kuat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis serta menyertakan analisa dan pembacaan situasi mutakhir yang menyangkut penerapan kebijakan programatik. Yang terakhir ini meliputi akselerasi sintesis atas beragam konsensus universal seperti SDGs, UNESCO 21st Century Skills, PISA Global Competence hingga praktik baik pendidikan serta pandangan pakar dan praktisi pendidikan (Anindito Aditomo, 2021).

Oleh karena itu dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 disebutkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat,



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian ini merupakan manifestasi dari hakikat pendidikan yang selaras dengan fitrah manusia sebagai makhluk pembelajar. Sepanjang hayatnya pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk memaknai hidupnya yang fana untuk mencapai kedudukannya secara paripurna. Bahwa hakikat manusia dilihat dari bagaimana dia terus menerus belajar dan melakukan perbaikan dari pembelajarannya. Pengertian ini merupakan manifesto abadi. Sehingga pendidikan dasar meresponnya dengan memperkuat manifesto pendidikan ini melalui internalisasi nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.



Profil Pelajar Pancasila adalah sebuah profil ideal karakter pelajar di Indonesia yang harus diwujudkan oleh semua pihak melalui enam elemen kunci. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:



Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Memiliki makna pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan akhlak bernegara.



Berkebinekaan Global

Bermakna pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan.



Bergotong Royong

Bergotong royong bermakna pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.



Mandiri

Mandiri bermakna pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.



Bernalar Kritis

Bernalar kritis bermakna pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.



Kreatif

Kreatif bermakna pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Kemendikbud menguraikan lebih jauh rumusan Profil Pelajar Pancasila dalam lingkup kebijakan meliputi aspek pembelajaran murid, pembelajaran dan kompetensi guru, kepemimpinan pendidikan, evaluasi dan perbaikan sistem serta kemitraan dengan pihak luar seperti Pemda, ormas, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Secara internal dunia pendidikan juga mempersiapkan terwujudnya Profil Pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran yang terpadu dan menyeluruh melalui akselerasi penciptaan budaya sekolah yang mendukung ekosistem pendidikan. Keterpaduan dan skema holistik lingkungan pendidikan terwujud dalam integrasi dimensi intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler (Anindito Aditomo, 2021).

Pada dasarnya kebijakan yang hendak diterapkan pada lokus sekolah dasar juga mendorong terapan nilai-nilai Pancasila yang abstrak menjadi lebih konkret dan terukur. Sehingga dialektika terapan ide-ide Pancasila mewujud dalam ruang hidup pendidikan yang secara konseptual kukuh terencana dan secara realitas menyesuaikan dengan ruang hidupnya (realistis). Ibarat air yang menyesuaikan dengan wadahnya, nilai-nilai Pancasila yang hendak diterapkan pada lingkup pendidikan menyesuaikan dengan alam pikir peserta didik sesuai jengjangnya.





Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

C Tunas Pancasila

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sementara Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pengertian atas pendidikan tersebut selain menjadi landasan formal yuridis untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, juga menyimpan falsafah pendidikan yang kuat dalam mendorong penyemaian nilai-nilai Pancasila. Hal itu selaras dengan maksud Ki Hajar Dewantara bahwa:



“Mendidik itu sesungguhnya terdapat pada sifat setiap makhluk. Setiap hari kita semua dapat mengetahui cara seekor induk ayam mendidik anak-anaknya dan juga mempelajari cara induk ayam tersebut mencari makan. Lihat pula kehidupan kucing betina dengan anak-anaknya, serta binatang lain. Ternyata binatang pun melakukan ‘pendidikan’. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia sebagai makhluk terluhur, pendidikan memiliki sifat yang lebih tertib dan sempurna dibandingkan pendidikan yang kita lihat dalam kehidupan binatang” (2009: 13).

Ketentuan UU yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dalam berbagai jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Profil Pelajar Pancasila yang hendak diciptakan dalam lingkup pendidikan dasar dan menengah merupakan program yang digagas Kemendikbud. Tujuan pendidikan dasar dan menengah yang memiliki aksentuasi berbeda membutuhkan pendalaman materi dan penyesuaian locus yang berbeda pula. Namun setiap jenjangnya tersusun secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Hal ini menuntut penyemaian nilai-nilai Pancasila tersusun secara terencana, terarah, dan berkesinambungan pula dalam lingkup pendidikan dasar, khususnya di sekolah dasar. Atas pertimbangan ini pula gagasan Tunas Pancasila hendak ditanamkan pada lingkup sekolah dasar.

Merujuk pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter memberikan landasan hukum yang kuat untuk upaya penyemaian nilai-nilai Pancasila. Pertimbangan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti tidak lain tercermin dalam sila-sila Pancasila. Tantangan bangsa ke depan perlu untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, merupakan ulasan yang memperdalam wujud nilai Pancasila.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 terdapat keterangan bahwa tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial, yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Pada lingkup sekolah dasar yang ingin menyiapkan tunas-tunas Pancasila sejalan dan memperkuat pendidikan karakter. Yudi latif membahasakan pendidikan karakter sebagai payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal. Hal itu meliputi penalaran moral, pengembangan kognitif, pembelajaran sosial dan emosional, pendidikan moral, pendidikan keterampilan hidup dan seterusnya (2018: 275). Sehingga salah satu kebijakan Kemendikbud tahun 2020 untuk memperkuat penyemaian nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari Asesmen Nasional sebagai Penanda Perubahan Paradigma Evaluasi Pendidikan adalah adanya survei karakter.



Asesmen Nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Survei karakter sendiri dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak Profil Pelajar Pancasila. Sehingga aspek olah rasa, olah hati, olah pikir dan olah raga di sekolah dasar benar-benar menghasilkan karakter tunas Pancasila.

Maka mempersiapkan warga sekolah untuk menyemai benih-benih Pancasila menuntut adanya kesamaan gagasan dan kreativitas tindakan baik dari capaian keberhasilan yang diharapkan, menciptakan lingkungan sekolah yang hidup dengan nilai-nilai Pancasila dan contoh-contoh penerapannya. Misalnya peserta didik mampu memahami bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, Indonesia adalah negerinya yang besar, bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, keragaman Indonesia adalah anugerah Tuhan, menghormati guru dan orang tua adalah watak bangsa Indonesia,

semangat belajar adalah etos bangsa Indonesia, bermusyawarah adalah ciri khas bangsa Indonesia dan seterusnya. Karakter Pancasila inilah yang semestinya tuntas tertanam dalam diri anak sekolah dasar hingga mereka memiliki bekal yang kuat melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya.

Ekosistem sekolah yang matang dan siap menghadapi tantangan zaman dengan kekuatan Pancasila menjadi syarat agar benih-benih tersebut tumbuh berkembang menjadi tunas-tunas Pancasila. Hariyono menyebutnya sebagai generasi pembelajar. Menurutnya Pancasila sebagai produk generasi muda masa lalu tidak lepas dari kreativitas hasil pembelajaran generasi muda saat itu yang merentang dari aspek empiris hingga dimensi etis (2014: 189-190).

Mengembangkan filsafat pendidikan berdasarkan Pancasila menjadi sebuah keperluan dan keharusan. Karena hanya bangsa Indonesia sendirilah yang bisa sadar dan memahami jati dirinya serta mampu mengembangkan model pendidikan bagi dirinya. Pengaruh luar atau kebudayaan luar merupakan faktor tambahan tanpa melupakan jati dirinya sebagai bangsa yang telah memegang Pancasila sebagai jati dirinya. Oleh karena itu, terlalu berusaha mewujudkan sebuah pendidikan bergaya Finlandia semata, misalnya, hanya akan menjauhkan makna pendidikan kita dari Filsafat Pendidikan Pancasila. Boleh jadi memang Finlandia dianggap sebagai sebuah negara dengan pendidikan maju, tetapi kita jangan lupa, kemajuan ini hanya dilihat pada aspek kognitif saja. Kalaulah terdapat aspek moral, tampaknya tidak semua bersifat universal yang bisa cocok dengan karakter pendidikan kita dengan realitas manusianya yang unik.



Betapa pun pendidikan kita tertinggal secara kognitif dari bangsa luar misalnya, ini tidak berarti kita harus berusaha dan bercita-cita untuk meniru begitu saja pendidikan mereka untuk menjadi gambar dan watak pendidikan Indonesia. Kekurangan dan kekalahan dari aspek kognitif itu harus tetap kita kejar, tetapi dia harus dikawal dengan aspek batin yang lahir dari aspek moral kebangsaan kita, yang senantiasa terhubung dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, kita tidak lagi memahami bahwa kepintaran dan kecerdasan itu hanya pintar secara akademik, tetapi juga luhur sikapnya secara moral. Inilah genuinitas Filsafat Pendidikan Pancasila.

Oleh karena itu, satuan pendidikan kita harus mulai membangun filsafat pendidikan ini dengan memadukan aspek pikir dan zikir, intelektualitas, dan moralitas. Hal ini yang disinyalir oleh Djoko Marihandono dalam merefleksikan sistem *among* Ki Hajar Dewantara sebagai bagian membangun kemandirian bangsa. Bahwa sistem *among* yang tercermin dari semboyan *Tut Wuri Handayani* merupakan:

“Sistem pendidikan yang didasarkan dari jati diri bangsa akan membuat bangsa yang mandiri, terlepas dari kungkungan bangsa Barat yang selama ini telah menciptakan pendidikan yang berorientasi pada kepentingan kolonial. Sistem among yang ia canangkan memiliki makna bahwa anak akan tumbuh secara leluasa. Pamong wajib Tut Wuri Handayani yang berarti mengikuti dan mempengaruhi agar anak asuh dapat berjalan ke arah yang baik. Dengan adanya sistem among ini, maka bebaslah anak mengembangkan bakatnya dan anak didik selalu mencari jalan sendiri tanpa menunggu perintah dari atasannya” (2017: 76).

Rangkaian penggalian Pancasila, pemahaman Pancasila dan penyemaian Pancasila menyimpan salah satu gagasan filsafat pendidikan Pancasila yakni proses pembelajaran sepanjang hayat dari generasi ke generasi secara turun temurun dengan inovasi tiada henti. Regulasi tentang pendidikan menyebutnya dengan usaha sadar dan terencana setiap jenjangnya yang tersusun secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Bagaimana menjaga ritme dan stamina pendidikan yang luar biasa panjangnya ini membutuhkan ragam metode

yang kreatif dan tepat pada jenjang pendidikan.

Ki Hajar Dewantara mengulasnya dengan ragam metode yakni memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah/paksaan/hukuman, tindakan (laku), pengalaman lahir dan batin (2009: 11). Sehat Sultoni Dalimunthe menyimpulkan metode pendidikan karakter dari perspektif Al-Quran yakni: keteladanan, perumpamaan, kisah-kisah, kebiasaan atau pembiasaan, amal saleh-etos kerja, metode tanya jawab, nasehat, balasan kebaikan dan keburukan (2016: 183-287). Pilihan metode pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, pada dasarnya selaras dengan pendapat para pakar pendidikan. Dengan kata lain bagaimana penyemaian Pancasila di sekolah dasar dapat menumbuhkan tunas-tunas Pancasila merupakan ruang kreatifitas guru dan sekolah untuk menetapkan metode mendidik yang tepat bagi anak peserta didik.

Sayidiman Suryohadiprojo merekomendasikan “Kemendikbud untuk melakukan pendalaman bagaimana sebaiknya nilai-nilai Pancasila ditransfer menjadi dasar untuk perbuatan nyata”. Menurutnya perlu dilakukan “pemantapan para tenaga pendidik agar mereka benar-benar memahami dan menjalankan kehidupan dengan dasar Pancasila” (2014: 19-20). Meminjam bahasa Yudi Latif dengan “membumikan Pancasila”. Pancasila yang dipandang sangat luhur harus hidup dalam realitas dan tidak berhenti hanya sebagai retorika dan hiasan semata (2015: 208). Tanpa tenaga pendidik yang kreatif dan berdedikasi menjalankan pendalaman Pancasila akan hilang kesempatan untuk menyemai nilai-nilainya kepada peserta didik khususnya di sekolah dasar.

Anak-anak adalah tunas masa depan bangsa. Usia anak-anak merupakan masa keemasan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah ruang bermain yang menyenangkan bagi peserta didik sekolah dasar. Dia dekat bagi mereka karena itu bagian dari laku keseharian mereka, menjawab kebutuhan keseharian mereka dan itu tampil dalam pembiasaan dan contoh yang tersedia dalam lingkungan belajar mereka. Ibarat tumbuhan, masa anak-anak paling mudah untuk dibentuk seperti halnya pohon kecil. Berbeda jika pohon yang membesar di mana batangnya sudah keras dan akan mudah patah jika diberlakukan kasar atau bahkan tidak bergeming sama sekali (Umar Baradja, 1992: 12).

Di sinilah eksistensi pendidikan dasar khususnya dalam lingkup sekolah dasar menjawab tantangan

jaman. Ki Hajar Dewantara menisbatkan pendidikan dengan seorang pengukir kayu, "pendidikan adalah mengukir manusia". Sebagai seorang pengukir tentu harus mengetahui objek kayu dalam berbagai halnya, mengerti keindahan ukiran, dan mengerti ragam jenis ukiran lainnya. Oleh karena itu, peserta didik sekolah dasar sebagai objek pendidikan harus menyertakan gagasan dasar bahwa mereka adalah anak-anak yang sedang tumbuh untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Sehingga sekolah dasar pada dasarnya menyediakan "bahan dasar kayu terbaik" untuk dibentuk menjadi jenis ukiran terbaik. Selain aspek fisik peserta didik, mengukir jiwa-jiwa mereka agar dekat dengan Pancasila, mengerti kebaikan Pancasila, dan menyediakan contoh-contoh terbaik bahwa Pancasila itu konkret bagi mereka. Itulah esensi dari penyemaian tunas-tunas Pancasila.





Jika diperhatikan lebih seksama ulasan tentang makna yang tersedia dalam sila-sila Pancasila, UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 terdapat kesinambungan tema tentang bagaimana karakter manusia Indonesia yang ingin diwujudkan dalam pendidikan. Aspek-aspek yang membentuk manusia Indonesia mendapat pantulan dari esensi sila-sila ketuhanan, kemanusiaan dan seterusnya. UU sendiri menekankan pada kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang isinya bercermin atas makna-mana dalam sila Pancasila.

Adanya Perpres yang memang bertujuan memperkuat pendidikan karakter selaras dengan tujuan penyemaian nilai-nilai Pancasila.

Permendikbud sendiri menentukan tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang selaras dan mengisi lebih dalam dalam praktek pendidikan yang berjalan. Relasi antar ketentuan tersebut nampaknya menekankan hal sangat kuat bagaimana jiwa-jiwa yang tumbuh dalam pendidikan di Indonesia mengagungkan kedudukan manusia sebagai makhluk intelektual, sosial dan spiritual. Ketiga landasan ini yang semestinya diperkuat dalam pendidikan sekolah dasar. Tunas Pancasila mengikatnya menjadi predikat akhir dari semesta pendidikan dasar dan mengantarkan lebih jauh menuju Profil Pelajar Pancasila.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud



05



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

Penutup

Buku Tunas Pancasila ini pada dasarnya buku yang memberikan ringkasan komprehensif tentang Pancasila yang ditujukan bagi warga sekolah. Kemendikbud ingin mendorong warga sekolah menciptakan ekosistem sekolah yang mampu menyemai anak didik menjadi tunas-tunas Pancasila. Bahwa Pancasila mampu dipahami oleh anak didik dengan alam pikirnya yang berkesesuaian dengan realitas pendidikan, khususnya pada pendidikan sekolah dasar.

Alur penulisan buku ini sejak penggalian Pancasila, pemahaman Pancasila hingga bagaimana melakukan penyemaian nilai-nilai Pancasila ditujukan bagi orang dewasa dan warga sekolah menikmati

dunia pendidikan sebagai wahana melestarikan kebaikan bangsa ini. Tugas orang dewasa dalam lingkup sekolah dasar menurunkannya dalam segenap kegiatan sekolah. Dan menjajarkannya dalam tujuan-tujuan khusus yang menciptakan mental karakter baja atas anak didik seperti halnya mental baja yang dimiliki oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan dan melestarikan Pancasila. Pendidikan sekolah dasar memberikan fondasi yang kukuh dan menyiapkan anak didik untuk maju terus pendidikan selanjutnya dalam tingkat yang lebih tinggi.



Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

Kesimpulan yang dapat digaris bawahi dalam bagian penutup buku ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan cerminan watak bangsa Indonesia hasil penggalan *founding fathers* yang ditempatkan sebagai simpul pengikat negara dan bangsa. Ikatan Pancasila mewujud dalam dinamika negara dan bangsa, baik dirasakan ataupun tidak terasa.
2. Terdapat pertalian yang kuat antara Pancasila sebagai sebuah konsep dan sebagai kenyataan hidup bangsa Indonesia. Memahami relasi keduanya membutuhkan pendekatan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat keberadaannya.
3. Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada dunia pendidikan merupakan bagian dari pelestarian negara dan bangsa Indonesia. Profil Pelajar Pancasila dan Tunas Pancasila merupakan bagian dari ikhtiar dunia pendidikan mempersiapkan manusia Indonesia seutuhnya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang mampu meruntuhkan imperialisme penjajahan. Hal tersebut menginspirasi kita untuk menghadapi era digital yang penuh inovasi dan kreasi. Salah satu tantangan ke depan adalah menciptakan mental etos kerja bagi warga sekolah yang akan menjadi teladan bagi anak didik sekolah dasar. Setiap jaman memiliki masalahnya masing-masing, tetapi spirit ke depan adalah memastikan anak didik memiliki etos kerja. Pancasila merupakan salah satu cerminan etos kerja pada masa perjuangan kemerdekaan yang tentu berbeda secara fisik dengan masa sekarang dan yang akan datang. Serta beragam tantangan lain yang para pendidik tentu lebih peka menghadapi ujian zaman kini dan ke depan.





Sumber Foto: Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbud

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulgani, Roeslan. *Pancasila: Perjalanan Sebuah Ideologi*, Jakarta :Grasindo, 1998.
- Affandi, Hernandi. *Pancasila: Eksistensi dan Aktualisasi*, Yogyakarta: Andi, 2020.
- Al-'Abidi, Syaikh Falah & Sayyid Sa'ad Al-Musawi. *Buku Saku Logika: Sebuah Daras Ringkas*, Jakarta: Sadra Press, 2018.
- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan*, Jakarta: LP3ES, Cetakan ketiga, Juni 2010.
- Aning, Floriberta (Peny.). Ir. Sukarno: *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Yogyakarta: Media Pressindo, Cetakan kedua 2017.
- Bakker, Anton. *Ontologi atau Metafisika Umum: Filsafat Pengada dan Dasar-dasar Kenyataan*, Yogyakarta: Kanisius, Cetakan pertama 1992.
- Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Baradja, Umar. *Bimbingan Akhlak bagi Putra-Putri Anda 1 (terj.)*, Surabaya: YPI Al Ustadz Umar Baradja, Cetakan ke-40: 1992.
- Dalimunthe, Sehat Sultoni. *Filsafat Pendidikan Akhlak*, Yogyakarta:Deepublish, Desember 2016. Darul Azka (peny). Sulam Al-Munawraq, Kediri: Santri Salam Press, Cetakan II, 2013.
- Descartes, Rene. *Diskursus & Metode*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
- Gharawiyani, Mohsen. *Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam: Penjelasan untuk Mendekati Analisis Teori Filsafat Islam*, Jakarta: Sadra Press, 2012.
- Hariyono. *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, Cetakan Kedua Agustus 2014.
- Hatta, Mohammad dkk. *Uraian Pancasila Dilengkapi dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, Jakarta: Penerbit Mutiara, Cetakan kedua: 1984.
- Ibrahimi, Muhammad Nur. *Logika Lengkap*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
- Soekarno, Ir. *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*, Bandung: Segarsy, 2018.
- _____. *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Cetakan II, 1963.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*, Bandung: Penerbit Arasy, 2005.
- Kementerian Penerangan RI. *Sistema Filsafat Pantjasila: Pidato Merajakan Hari Lahirnja Pantja Sila (1 Djuni 1945) pada tanggal 5 Djuni 1958 didepan Rakjat diruangan Istana Negara Djakarta yang dihadiri oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia dan Para Menteri serta Para Sardjana diutjapkan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin Anggota Dewan Nasional*, Penerbitan Khusus: 1958.
- Ki Hajar Dewantara. *Pantjasila*, Jogja: N.V. Usaha Penerbitan Indonesia, 1950.
- _____. *Menuju Manusia Merdeka*, Yogyakarta: Leutika, Cetakan pertama Juli 2009.
- Lahirnja Pantja Sila: *Boeng Karno Menggembleng Dasar-dasar Negara*, Jogjakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer, 1947.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Kelima Desember: 2015.
- _____. *Revolusi Pancasila*, Jakarta: Mizan, Cetakan ke-6, Agustus 2017.
- _____. *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*, Jakarta: Mizan, Cetakan I 2018.



- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan, 2009.
- Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Malaka, Tan, Madilog: *Materialisme, Dialektika, dan Logika*, Yogyakarta, 2014.
- _____. *Naar de Republiek Indonesia: Menuju Republik Indonesia*, Malang: Segarsy, 2014.
- Poespoprodjo dan T. Gilarso. *Logika Ilmu Menalar Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Alitis, Dan Dialektis*, Malang: Pustaka Grafika, 1999.
- Rahardjo, Iman Toto K & Suko Sudarso. *Bung Karno, Islam, Pancasila & NKRI*, Jakarta: Komunitas Nasionalis Religius Indonesia, Desember: 2006.
- Riyanto, Armada (eds.). *Kearifan Lokal Pancasila: Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika*, Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, Cetakan kedua belas 2000.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. *Mengobarkan Kembali Api Pancasila*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- Suwarno, Dr. P.J, SH. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, Cetakan I, 2006.
- _____. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*, Jakarta, The Wahid Institute, Cetakan I, 2007.
- _____. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, Cetakan I 2000.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad dkk. *Spiritualisme Pancasila*, Jakarta: Prenadamedia Grup, Cetakan Kedua Januari 2018.
- Wreksosuhardjo, Prof. Drs. Sunarjo. *Filsafat Pancasila secara Ilmiah dan Aplikatif*, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Zuchron, Daniel. *Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-Amendemen*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017.

Dokumen

UUD 1945

UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Anindito Aditomo, Ph.D, *Nilai-nilai Pancasila dalam Pembelajaran Merdeka Belajar*, Kemendikbud: Slide presentasi Mei 2021

Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya*. Diperbanyak dalam rangka pameran Tokoh Ki Hadjar Dewantara di Museum Kebangkitan Nasional 27 April s.d 31 Mei 2017 yang diselenggarakan oleh Museum Kebangkitan Nasional

Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 293/sipres/A6/X/2020 Tentang Asesmen Nasional sebagai Penanda Perubahan Paradigma Evaluasi Pendidikan

TUNAS PANCASILA



Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Direktorat Sekolah Dasar
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
